



2024

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Jln Jendral Ahmad Yani No. 17A Muara Enim

Telp/Fax: 0734 421194

www.pn.muaraenim.go.id

PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyusun dan menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB Tahun 2024.

Laporan Penyelesaian Kegiatan ini dimaksud untuk memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, juga sebagai bahan evaluasi kerja baik yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan untuk Tahun 2024 dan mempersiapkan diri memasuki tahun anggaran 2025. Selain itu laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dan transparansi dari Pengadilan kepada Masyarakat.

Kami menyadari laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan tujuan yang diharapkan, hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang kami miliki.

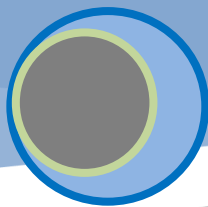
Laporan ini dapat terlaksana berkat usaha dan kerja sama seluruh pegawai Pengadilan Negeri Muara Enim, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kami berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan Laporan Penyelesaian Kegiatan ini dan disadari terdapat kekurangan yang perlu penyempurnaan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik membangun demi kesempurnaan pelaksanaan tugas untuk masa-masa yang akan datang. Semoga laporan ini punya makna dan arti dalam kegiatan keseharian kita.

Muara Enim, 06 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim



ARI OURNIAWAN, SH.,MH
NIP. 19790711 200212 1 003

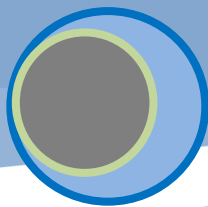




DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN	5
BAB II A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM	
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	14
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	15
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	15
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	15
B. PENYELESAIAN PERKARA	
- Jumlah sisa perkara yang diputus	16
- Jumlah sisa perkara yang diputus tepat waktu	16
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	17
- Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi	17
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi.....	17
C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	
- Posbakum (Satker yang mendapatkan alokasi dan realisasi anggaran).....	18
- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	19
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	
KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/ GOLONGAN/PENDIDIKAN	
- Mutasi	22
- Promosi	24
- Pensiun	25
- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti diklat)	25
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	
A. Pengelolaan Keuangan	27
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	28
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	55
- Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum ...	55
- Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum.....	58





- Implementasi e-berpadu di lingkungan Peradilan Umum	60
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	
- Pembangunan Zona Integritas	63
- Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan tangguH (AMPUH)	67
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	69
- Inovasi Pelayanan Publik	85
BAB VI PENGAWASAN	
A. Internal	92
B. Evaluasi	95
BAB VII PENUTUP	
A. Kesimpulan	97
B. Rekomendasi.....	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

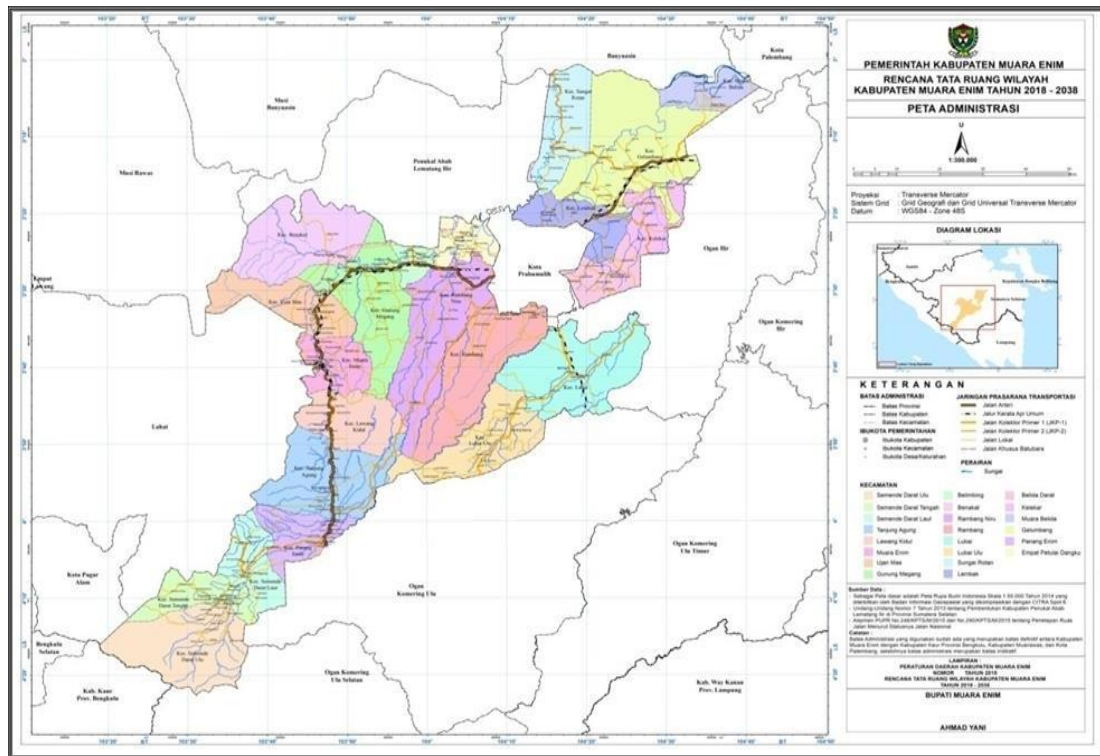
Sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dalam kerangka tersebut dibutuhkan suatu lembaga peradilan untuk masyarakat umum.

Kekuasaan badan peradilan adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 guna terselenggaranya negara hukum.

Kekuasaan tersebut oleh UUD 1945 diberikan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta badan-badan peradilan yang ada dibawahnya, diantaranya adalah badan peradilan umum yang pada peradilan tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri. Kantor Pengadilan Muara Enim beralamat Jl. Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kec. Muara Enim, Sumatera Selatan. Pengadilan Negeri Muara Enim merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang. Gedung Pengadilan Negeri Muara Enim diresmikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, Bapak Suroto, SH pada tanggal 19 Juli 1976. Wilayah yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim meliputi 2 (Dua) Kabupaten

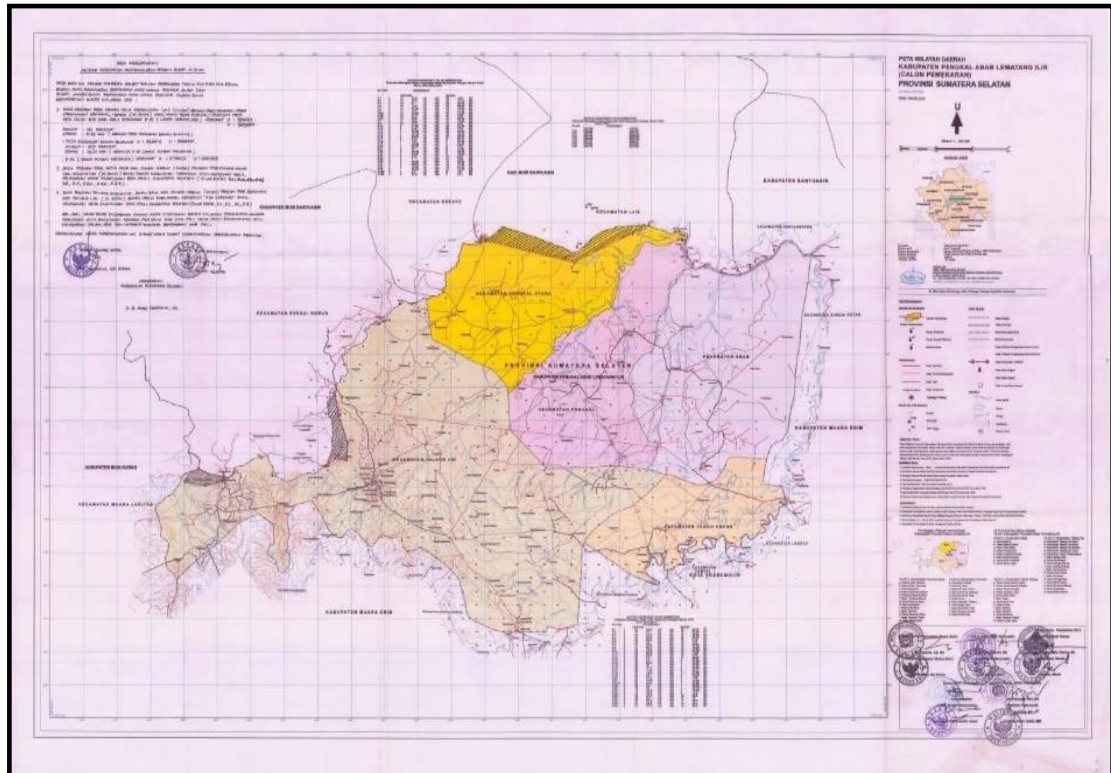


yaitu: Kabupaten Muara Enim yang terdiri dari 22 (Dua puluh dua) Kecamatan dan Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI) yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan.



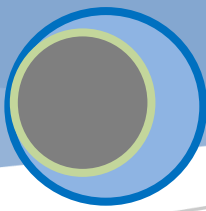
Peta lokasi wilayah Yuridiksi Kabupaten Muara Enim





Peta lokasi wilayah Yuridiksi Kabupaten Muara Enim





TUGAS POKOK

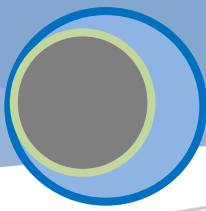
Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai salah satu Badan Peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya di bidang hukum, perdata dan pidana (pasal 2 Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum).

FUNGSI

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain:

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial dan teknis non yudisial.
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Pejabat struktural, fungsional dan staf- staf agar pelaksanaan kegiatan administrasi perkara maupun administrasi umum dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
6. Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi





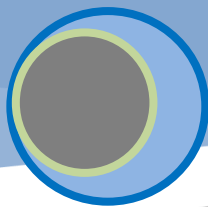
informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Sebelum tahun 2004, Pengadilan Negeri Muara Enim berada dibawah Departemen Hukum dan HAM dan baru sejak diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum maka seluruh Peradilan yang berada di seluruh Indonesia berada satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tanggal 4 Juli 2022 Pengadilan Negeri Muara Enim resmi naik kelas, dari Type/ Kelas II menjadi Type/Kelas IB sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 771/SEK/SK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang pemberlakuan peningkatan kelas Pengadilan Negeri Muara Enim dari Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas II menjadi Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB. Pada tanggal 21 Juli 2022 Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Dr. Moh. Eka kartika EM, SH.,M.Hum meresmikan kenaikan type/kelas Pengadilan Negeri Muara Enim.

Sejak berdirinya tahun 1976-2022, Pengadilan Negeri Muara Enim mempunyai 18 (Delapan Belas) orang Ketua Pengadilan, yang tercantum di bawah ini :





No	NAMA	MASA JABATAN
1.	ODJAK SOETISNA, SH	1978-1982
2.	SJAFEI HIDAJAT, SH	1982-1988
3.	MOHAMMAD HASBI, SH	1988-1989
4.	LEO LUHUT HUTAGULUNG, SH	1989-1991
5.	H. ACHJAR LUBIS, SH	1991-1996
6.	SULTONI MOHDALLY, SH	1996-1998
7.	H. UMAR HAMDAN	1998-2004
8.	H. HERRI SWANTORO, SH.,MH	2004-2006
9.	EKO TUNGGUL PRIBADI, SH	2006-2008
10.	H. AGUSTI, SH.,MH	2008-2009
11.	FIRMAN, SH	2009-2011
12.	KAMALUDIN, SH.,MH	2011-2014
13.	ABU HANIFAH, SH.,MH	2014-2016
14.	AS'AD RAHIM LUBIS, SH.,MH	2016-2019
15.	AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, SH	2019-2021
16.	ELVIN ADRIAN, SH., MH	2021-2024
17.	Dr. YUDI NOVIANDRI, SH, MH	2024-2024
18.	ARI QURNIAWAN, SH, MH	2024-SEKARANG

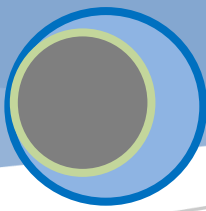
B. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Muara Enim

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Enim. Visi Pengadilan Negeri Muara Enim mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim yang Agung”





Misi Pengadilan Negeri Muara Enim :

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai berikut :

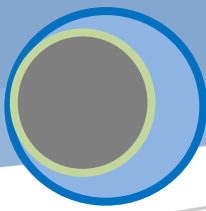
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara Enim.

C. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan menguraikan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan





D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2024, terdiri dari :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
2. Panitera
3. Sekretaris
4. Panitera Muda :
 - Panitera Muda Pidana
 - Panitera Muda Perdata
 - Panitera Muda Hukum
5. Kasubbag :
 - Kasubbag Umum dan Keuangan
 - Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
 - Kasubbag Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
6. Fungsional Panitera Pengganti
7. Fungsional Jurusita
8. Fungsional Umum/Pelaksana



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

KETUA
ARI OUBRIANWAL, S.H., M.H.

WAKIL KETUA
ARIEF KARYADI, S.H., M.HUM

HAJIM

1	MIRYANTO, S.H., M.H
2	SHELLY NOVERIYATI, SH
3	SERA RICKY SWANRI, S.H
4	TTITIS AYU WULANDARI, SH
5	DEWI YANTI, SH

PANITERA
HAMMEN, SH

SEKRETARIS
YURIKA ARIANI, ST, MM

KEPANITERAAN PERDATA

PANGIRO PERDATA	
1	ALIA DESNANI, SH, MM
2	FINNA PASTRI SIREGAR, SH
3	JAMAL PAIKO, SH
3	LIA PERMATA SARI, SH

KEPANITERAAN PIDANA

PANGIRO PIDANA	
1	DORY HASWINDA S, ST, SH, MM
2	IWAN FAURI, A,MD
3	ASTORY, SH

KEPANITERAAN HUKUM

PANGIRO HUKUM	
1	ARMAN, SH
2	HERIYANTO, SH
3	MI. JURSTIANDHA H P, SH

PTIP

KASUBBAG PTIP	
1	
2	
3	

KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

KASUBBAG KEPEGAWAIAN	
1	HENDRIK, SH
2	JIMMY OCTAVIANUS, A,MS
3	

UMUM DAN KEUANGAN

KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	
1	KIMS MUHAMMAD AMIN, SH, MM
2	
3	NANDA, A,MD AB
3	

FUNGSIONAL KEPANITERAAN

FUNGSIONAL KESEKRETARIATAN

KETERANGAN :

----- GARIS KOORDINASI

----- GARIS TANGGUNG JAWAB

DASAR :

SESUAI DENGAN PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015

TANGGAL 7 OKTOBER 2015



BAB II

PENGELOLAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

- a. Keadaan perkara di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Perkara Pidana

No	Satuan Kerja	Sisa perkara tahun lalu	Perkara Masuk 2024	Perkara yang diputus	Sisa Perkara	Ket
Pengadilan Negeri Muara Enim						
1.	Pidana	46	799	729	116	Pidana Biasa
		0	32	31	1	Pidana Anak
		0	23	23	0	Pidana cepat
		0	0	0	0	Pidana singkat/ringan/lain
		0	1	1	0	Pidana pra peradilan
		0	5640	5640	0	Pidana lalu lintas

Perkara Perdata

No	Satuan Kerja	Sisa Perkara Tahun lalu	Perkara Masuk 2024	Perkara yang diputus	Sisa Perkara	Ket
Pengadilan Negeri Muara Enim						
1.	Perdata	11	30	24	17	Gugatan
		0	133	123	10	Gugatan sederhana
		1	35	35	1	Permohonan

b. Keadaan perkara di tingkat Banding pada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Perkara banding 2024	Perkara yang putus tahun 2024	Ket
Pengadilan Negeri Muara Enim				
1.	Pidana	39	38	Pidana Biasa
		0	0	Pidana Anak
2.	Perdata	4	4	Gugatan

c. Keadaan perkara di tingkat Kasasi pada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Perkara kasasi 2024	Perkara yang putus tahun 2024	Ket
Pengadilan Negeri Muara Enim				
1.	Pidana	2	0	Pidana Biasa
		0	0	Pidana Anak
2.	Perdata	5	0	Gugatan

d. Keadaan perkara di tingkat Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Perkara PK 2024	Perkara yang putus tahun 2024	Ket
Pengadilan Negeri Muara Enim				
1.	Pidana	1	0	Pidana Biasa
		0	0	Pidana Anak
2.	Perdata	2	1	Gugatan



B. PENYELESAIAN PERKARA

a. Jumlah sisa perkara yang diputus

No	Satuan Kerja	Sisa perkara tahun lalu	Perkara Masuk 2024	Perkara yang diputus	Sisa Perkara	Ket
Pengadilan Negeri Muara Enim						
1.	Pidana	46	799	729	116	Pidana Biasa
		0	32	31	1	Pidana Anak
		0	23	23	0	Pidana cepat
		0	0	0	0	Pidana singkat/ringan/lain
		0	1	1	0	Pidana pra peradilan
		0	5640	5640	0	Pidana lalu lintas
2.	Perdata	11	30	24	17	Gugatan
		0	133	123	10	Gugatan sederhana
		1	35	35	1	Permohonan

b. Jumlah sisa perkara yang diputus tepat waktu

No	Satuan Kerja		Sisa Perkara Tahun lalu	Perkara Masuk 2024	Perkara yang diputus	Perkara putus tepat waktu	Persentase perkara yang diputus tepat waktu
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM							
1.	Pidana	Pidana Biasa	46	799	729	729	100 %
		Pidana Anak	0	32	31	31	100 %
2.	Perdata	Gugatan	17	30	24	19	79,17 %
		Gugatan sederhana	0	133	123	123	100 %
		permohonan	1	35	35	35	100 %

c. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK

No	Satuan Kerja		Sisa tahun lalu	Perkara Masuk	Perkara Putus	Perkara mengajukan			Perkara tidak ajukan		
						Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM											
1.	Pidana	Pidana Biasa	46	799	729	39	2	1	690	727	728
		Pidana Anak	0	32	31	0	0	0	31	31	31
2.	Perdata	Gugatan	11	30	24	4	5	2	20	19	22
		Gugatan sederhana	0	133	123	0	0	0	123	123	123
		permohonan	1	35	35	0	0	0	35	35	35

d. Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Perdata	Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di mediasi	Persentase perkara perdata yang berhasil mediasi
Pengadilan Negeri Muara Enim				
1.	Perdata Gugatan	41	0	0%

e. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Pidana Anak yang diajukan diversi	Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui diversi	Persentase perkara pidana anak yang berhasil diversi
1.	Pengadilan Negeri Muara Enim	0	0	0 %

C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

- **POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM)**

Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu dengan menyelenggarakan kegiatan pemberian layanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, salah satunya dengan pembentukan posbakum pengadilan. Posbakum (pos bantuan hukum) adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Negeri untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan kehakiman dan Peradilan Umum.

Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun 2024 mendapat anggaran dari Mahkamah Agung RI untuk Posbakum dalam DIPA 03 (Program peningkatan manajemen peradilan Mahkamah Agung RI) sebesar Rp 44,000,000,-. Realisasi untuk kegiatan posbakum ini adalah :

No	Satuan kerja	Pagu DIPA	Total realisasi		Sisa	Ket
			Rupiah	Persentase		
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM						
1.	Posbakum	Rp 44,000,000,-	Rp 44,000,000,-	100 %	0	

Posbakum Pengadilan Negeri Muara Enim dibentuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, bekerja sama dengan lembaga penyedia layanan hukum Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) Kabupaten Muara Enim dengan MOU Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 2565 /KPN.W6-U6/HK2.1/XII/2023 tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri

Muara Enim. Adapun masyarakat yang menggunakan layanan posbakum ini tercatat dalam buku register posbakum, yang di tanda tangani oleh petugas register posbakum dan Panitera Pengadilan Negeri. Masyarakat yang datang menggunakan posbakum untuk layanan konsultasi.

- **PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)**

Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu satu layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014 yaitu Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Dan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu, maka perlu dilakukan sosialisasi internal maupun eksternal mengenai program pembebasan biaya perkara atau prodeo terhadap masyarakat pencari keadilan. Untuk permohonan Prodeo tersebut merupakan hak dan tidak ada yang menghalangi karena didukung oleh bukti-bukti yang cukup.

Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun 2024 mendapat anggaran dari Mahkamah Agung RI untuk Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) dalam DIPA 03 (Program peningkatan manajemen peradilan Mahkamah Agung RI) sebesar Rp 1,340,000,- Realisasi untuk kegiatan Prodeo ini adalah :



No	Satuan kerja	Pagu DIPA	Total realisasi		Sisa	Ket
			Rupiah	Persentase		
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM						
1.	Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	Rp 1,340,000,-	Rp 360,000,-	26,86 %	Rp 980,000,-	

Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun 2024 untuk target perkara prodeo sebanyak 2 perkara telah terealisasi. Penanganan Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) pada tahun 2024 :

Target Perkara yang di ajukan prodeo	Jumlah perkara yang mengajukan prodeo	Jumlah Perkara yang diselesaikan
2	2	2



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KEPANGKATAN / GOLONGAN / PENDIDIKAN

Sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) orang yang terdiri dari 7 (Tujuh) orang Hakim dan 21 (Dua Puluh Satu) pegawai.

a. Sumber Daya Manusia berdasarkan Kepangkatan / Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
II/c	1	1	2
III/a	2	2	4
III/b	3	2	5
III/c	5	2	7
III/d	3	3	6
IV/a	1	1	2
IV/b	1	-	1
IV/c	1	-	1
Jumlah	17	11	28

b. Sumber Daya Manusia berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sarjana (S-3)	-	-	-
Sarjana (S-2)	5	2	7
Sarjana (S-1)	10	8	18
Sarjana Muda	2	1	3
SMTA	-	-	-
SMTP	-	-	-
SD/SR	-	-	28
Jumlah	17	11	28



c. Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan Teknis / Non teknis / Staf

Jabatan Teknis/Non teknis	Golongan								Jumlah	
	I		II		III		IV			
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Hakim	-	-	-	-	2	3	2	-	4	3
Calon Hakim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panitera	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Sekretaris	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Panmud	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2
Kasubbag	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
PP	-	-	-	-	2	3	-	-	2	3
Jurusita	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
Jurusita Pengganti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pranata Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf	-	-	1	1	1	1	-	-	2	2
CPNS	-	-	-	-	2	1	-	-	2	1
JUMLAH	-	-	1	1	13	10	3	-	17	11

a. Mutasi

Adapun mutasi selama tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut:

a. Mutasi Masuk

Adalah mutasi masuknya Hakim atau pegawai ke Pengadilan Negeri Muara Enim :

1. ARI QURNIAWAN, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo menjadi Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB, terhitung melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 01 Agustus 2024.
2. ALIA DESNANI, S.H., M.M. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lahat menjadi Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB, terhitung melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 22 Mei 2024.

3. ARIF BUDIMAN JAYA ANUGRAH, S.H., M.H. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menjadi Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas 1B, terhitung melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 22 Mei 2024.
4. MIRYANTO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangko menjadi Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB, terhitung melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 22 November 2024.
5. IKA RIANTI, AM.Keb., S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangko menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB, terhitung melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 28 November 2024.
6. DORY HASWINDA SARI, ST., SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kayu Agung menjadi Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB, terhitung melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 16 Desember 2024

b. Mutasi Keluar

Adalah mutasi keluarnya hakim atau pegawai dari Pengadilan Negeri Muara Enim :

1. DAHLAN, S.H., M.M. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Muara Enim menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lahat, terhitung melaksanakan tugas mutasi tanggal 22 April 2024.
2. FAKHRIZAL, S.H. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Muara Enim menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, terhitung melaksanakan tugas mutasi tanggal 22 April 2024.



- ### **b. Promosi**

-

c. Pensiun dan Meninggal

Pada tahun 202 tidak ada pegawai yang pensiun dan meninggal.

d. Data hakim dan pegawai yang mengikuti diklat

Data hakim yang mengikuti Diklat Teknis dan Non Teknis pada 2024 yaitu :

No.	Nama	Nama Diklat	TMT Diklat	Instansi Penyelenggara
1.	- Arief Karyadi, S.H., M.Hum. - Sera Ricky Swanri S, S.H	Pelatihan Aparat Penegak Hukum dalam Penegakan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Angkatan 1 Tahun 2024	06 Maret s.d 08 Maret 2024	MARI
2.	Arief Karyadi, S.H., M.Hum	Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Kekayaan Intelektual	10 Oktober s.d 26 Oktober 2024	MARI
3.	Ari Qurniawan, S.H., M.H	Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga	13 November s.d 08 Desember 2024	MARI

Data Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dan Non Teknis pada 2024 yaitu :

No.	Nama	Nama Diklat	TMT Diklat	Instansi Penyelenggara
1.	- Syafullah. S.E., M.M - Yurika Ariani, S.T., M.M - Nanda., Amd.A.B	Sosialisasi Implementasi Digitalisasi Pengolahan Keuangan dan Sosialisasi Anti Korupsi	07 Mei 2024	KPPN LAHAT

2.	Syafullah. S.E., M.M	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	13 Mei 2024	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Pembendaharaan
3.	Kms Muhammad Amin, S.H., M.M	Penertiban Data Bmn Pada Korwil Sumsek Dalam Rangka Implementasi Siman V2	20 Mei 2024	KPPN LAHAT
4.	Yurika Ariani, S.T., M.M	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Mambayar (PPSPM)	22 Mei 2024	Pusdiklat Anggaran Dan Pembendaharaan, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan
5.	- Kms Muhammad Amin, S.H., M.M - Nanda., Amd.A.B	Bimtek Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Melalui Aplikasi Gaji	25 Juni 2024	KPPN LAHAT
6.	Nanda., Amd.A.B	Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara	17 September 2024 s.d 29 September 2024	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang (Non Operasional dan Operasional) dan Belanja Modal
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang (Non Operasional dan Operasional)

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Muara Enim tahun anggaran 2024, rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Total Realisasi		Sisa
			Rupiah	Persentas	
1	Belanja pegawai	Rp 3,353,495,000	Rp 3,229,614,896	96.31 %	Rp 123,880,104
2	Belanja Barang	Rp 1,282,131,000	Rp 1,277,409,304	99.63 %	Rp 4,721,696
3	Belanja Modal	Rp 48,000,000	Rp 48,000,000	100.00 %	Rp 0
Total		Rp 4,683,626,000	Rp 4,555,024,200	97.25 %	Rp 128,601,800

2. Pagu dan realisasi Dipa (03) Badan Peradilan Umum

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan non operasional dan operasional persidangan peradilan sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Total Realisasi		Sisa
			Rupiah	Persentase	
1	Belanja Barang	Rp 358,940,000	Rp 355,669,050	99.09 %	Rp 3,270,950
Total		Rp 358,940,000	Rp 355,669,050	99.09 %	Rp 3,270,950

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana



Gedung kantor Pengadilan Negeri Muara Enim masih terletak di jalan Jendral Ahmad Yani No. 17 A diatas tanah seluas 2.233 m² dengan luas tanah bangunan 1.034 m² dan luas tanah untuk sarana lingkungan (jalan, taman dan lain-lain) 679 m² dengan sertifikat Hak pakai No.7/kelurahan Muara Enim yang telah lama dibalik nama menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan No. 24 Tahun 2009 tanggal 18 November 2009 tentang persertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah. Untuk gedung kantor pengadilan sampai saat ini masih belum *prototype* sebagaimana yang ditentukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sarana kendaraan dinas, Pengadilan Negeri Muara Enim, kondisinya:

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Pengadilan Negeri Muara Enim					
	1. Kendaraan Roda 4	a. 2008	✓	-	-	-
	a. Kijang Innova					
	2. Kendaraan Roda 2					
	a. Honda NF.100	a. 2003	✓	-	-	-
	b. Honda NF.100	b. 2003	✓	-	-	-
	c. Honda Supra XNF 125 50	c. 2005	✓	-	-	STNK.AN .PT.PLG
	d. Honda Supra XNF 125 50	d. 2005	✓	-	-	STNK.AN .PT.PLG

2	Pinjam Pakai dari PEMKAB Muara Enim					
	1. Kendaraan Roda 4					
	a. Rush 1.5 M/T	a. 2022	✓	-	-	-
	b. Fortuner 2.8 GR 4X4 A/T	b. 2023	✓	-	-	-
	c. Toyota Kijang Standar KF 80 Log	c. 2003	✓	-	-	-
	d. Izuzu Fanter Turbo LV	d. 2013	✓	-	-	-
	2. Kendaraan Roda 2		✓	-	-	-
	a. Honda trail /T4G02T31L0 M/T	a. 2022		-	-	-
	b. Honda trail /T4G02T31L0 M/T	b. 2022	✓	-	-	-

Untuk kendaraan dinas roda empat (4), pada tahun 2024 sebanyak lima (5) unit yang digunakan oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Panitera, dan Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan Pengadilan Negeri Muara Enim

Untuk kendaraan dinas roda dua (2), sebanyak enam (6) unit. Yaitu :

- 1 (satu) unit Honda Supra NF 125 SD Tahun 2005, kondisi baik warna hitam dengan nomor polisi BG 5606 NZ digunakan oleh Jurusita
- 1 (satu) unit Honda Supra NF 125 SD tahun 2005 kondisi baik warna hitam dengan nomor polisi BG 5610 NZ digunakan oleh Kasub Umum dan Keuangan.
- 1 (satu) honda supra NF 100 tahun 2003 kondisi baik warna hitam dengan nomor polisi BG 6004 DZ digunakan oleh Jurusita Pengganti.
- 1 (satu) unit honda supra NF 100 tahun 2003 kondisi baik warna hitam dengan nomor polisi BG 6005 DZ digunakan oleh Bendahara Keuangan.



- 1 (satu) unit honda Trail / T4G02T31L0 M/T tahun 2022 kondisi baik warna hitam dengan nomor polisi BG 2153 DZ digunakan oleh Panitera Muda Hukum
- 1 (satu) unit honda Trail / T4G02T31L0 M/T tahun 2022 kondisi baik warna hitam dengan nomor polisi BG 2154 DZ digunakan oleh Kasub Kepegawaian dan Ortala

Adapun sarana dan prasarana pada Kantor Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain :

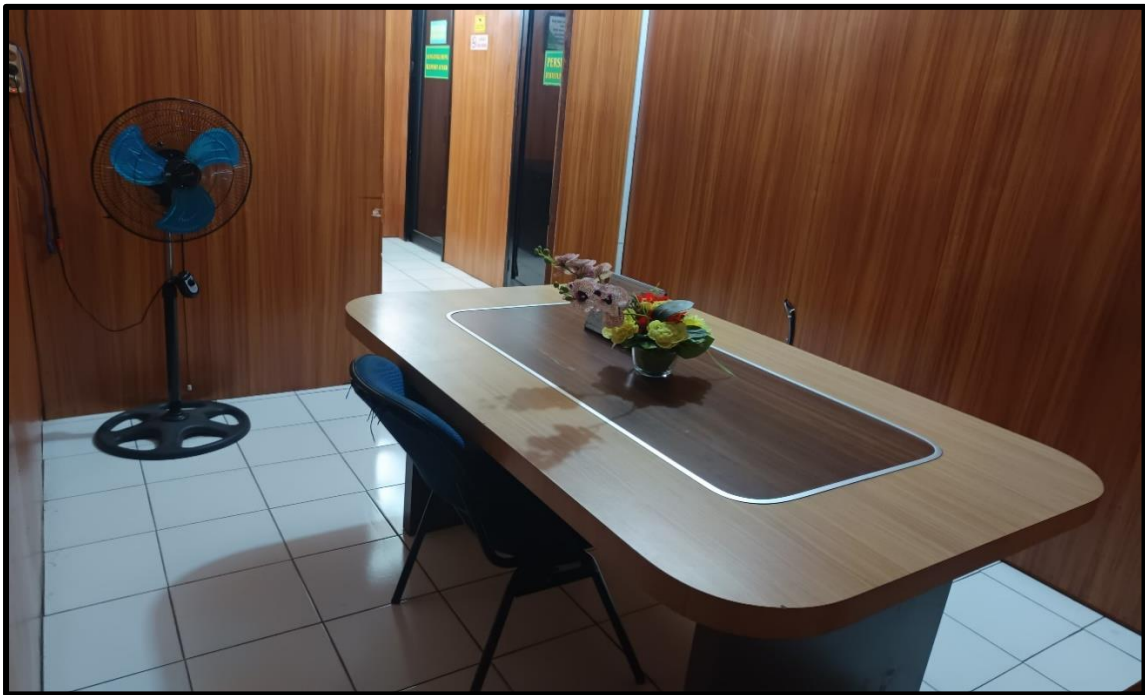
GAMBAR-GAMBAR SARANA DAN PRASARANA :



Ruang tunggu ramah anak



Ruang sidang anak

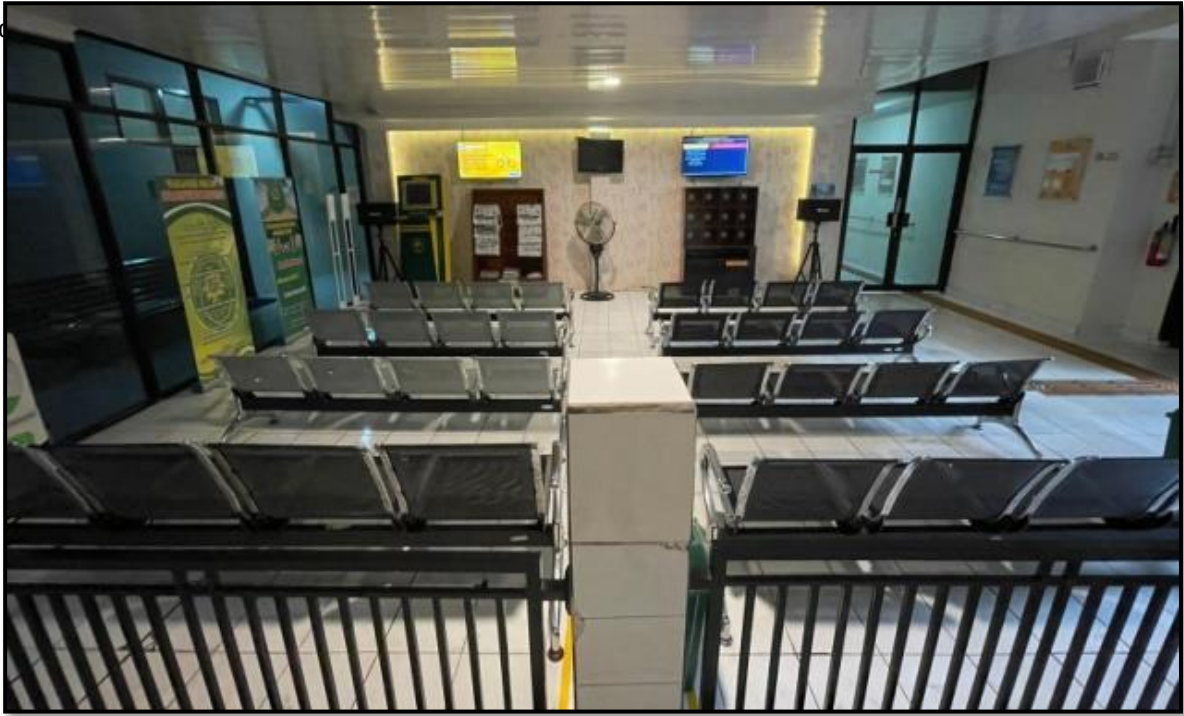


Ruang tunggu : anak korban, orang tua, BAPAS, penasehat hukum



Ruang video Conference pada ruang sidang anak



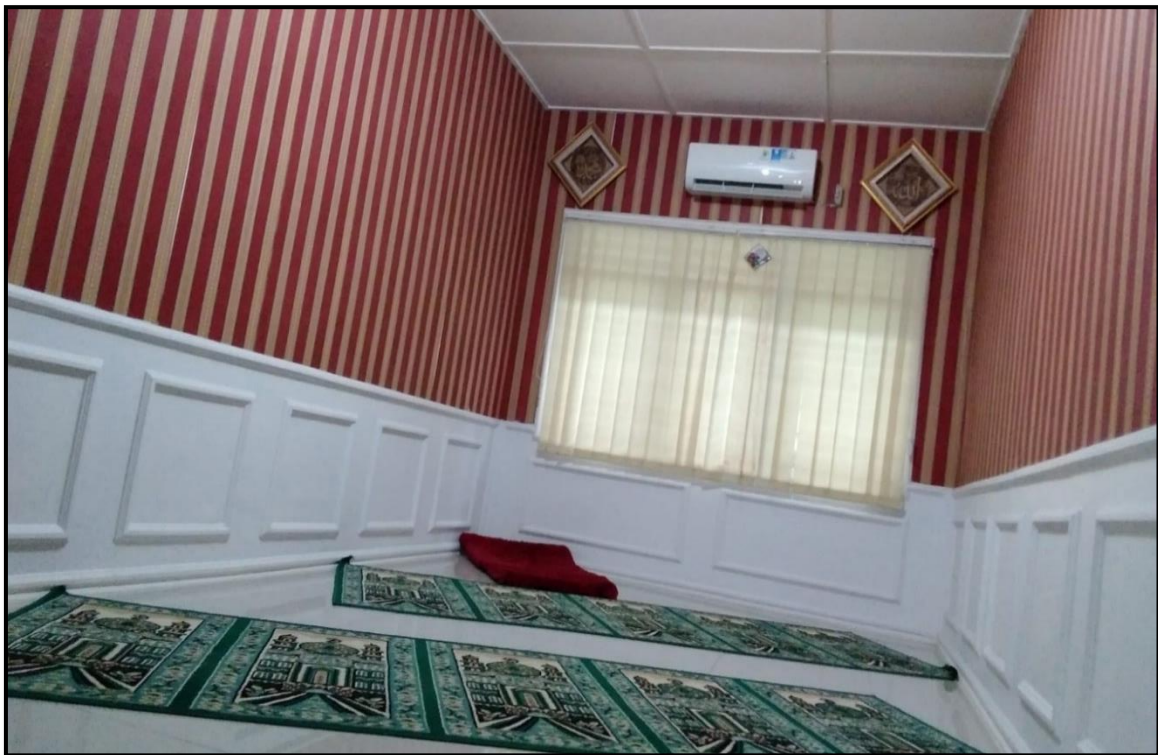


Ruang tunggu pengunjung dengan memasang TV jadwal sidang dan TV biaya radius perkara perdata





Ruang Tunggu Terbuka





Musholla

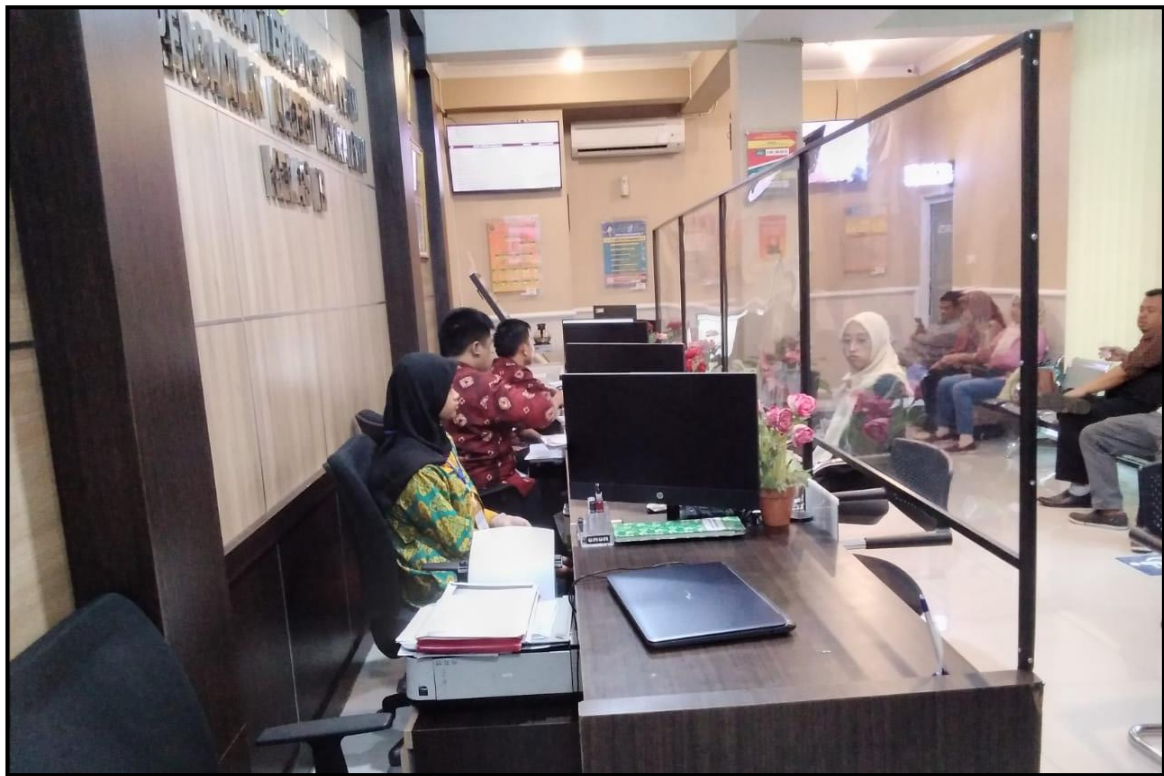


Ruang POSBAKUM



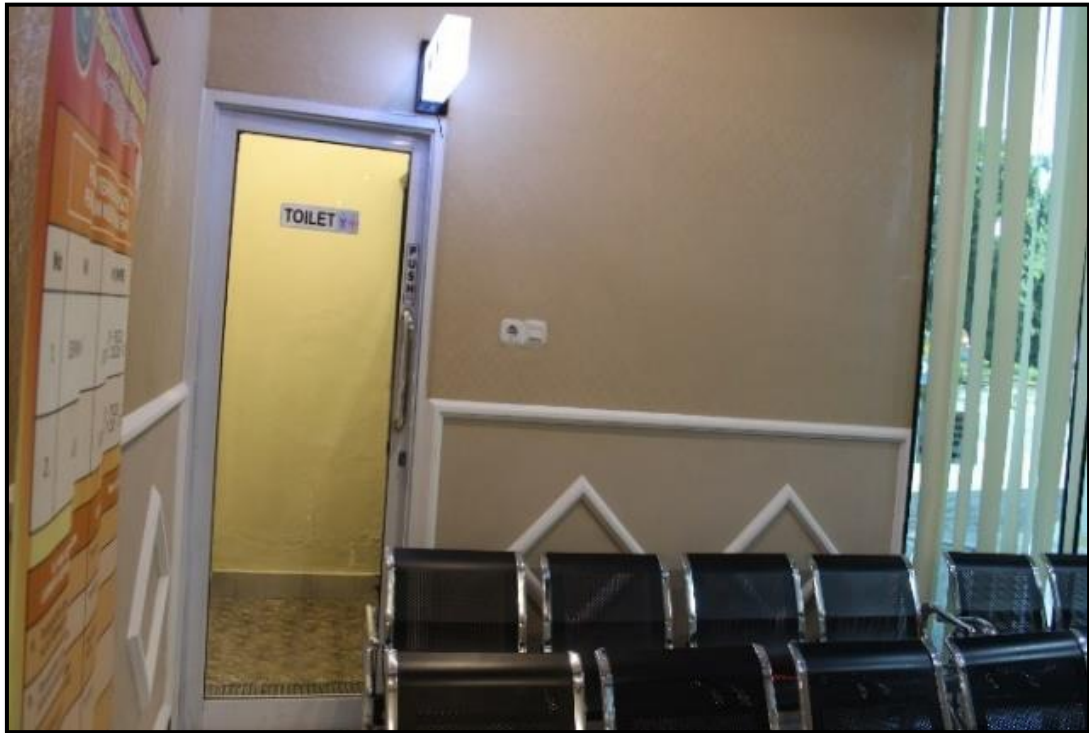
Ruang tunggu Jaksa





Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)





Kursi pengunjung PTSP dilengkapi dengan antrian pengunjung, media informasi (TV informasi) dan toilet khusus pengunjung



Meja Informasi dan Pengaduan



Pojok E-COURT & ERATERANG
Meja Inzage



Ruang khusus tamu pengunjung



Jalur khusus difabel



Area parkir khusus untuk disabilitas



Kursi roda untuk penyandang disabilitas



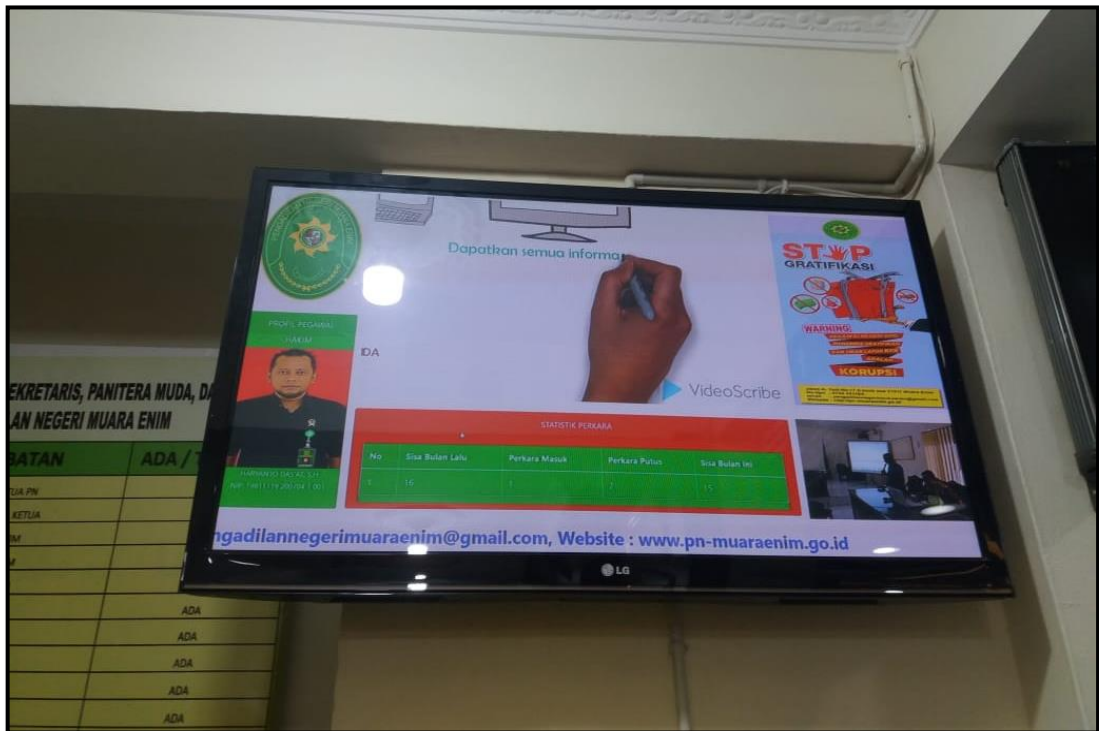
Kios K touchscreen untuk Survei IPK dan IKM



Meja untuk pengunjung menulis



Kotak saran manu



Televisi Informasi Profil



Ruang Mediasi



Ruang Sidang Prof. Dr. Kusumah Atmaja



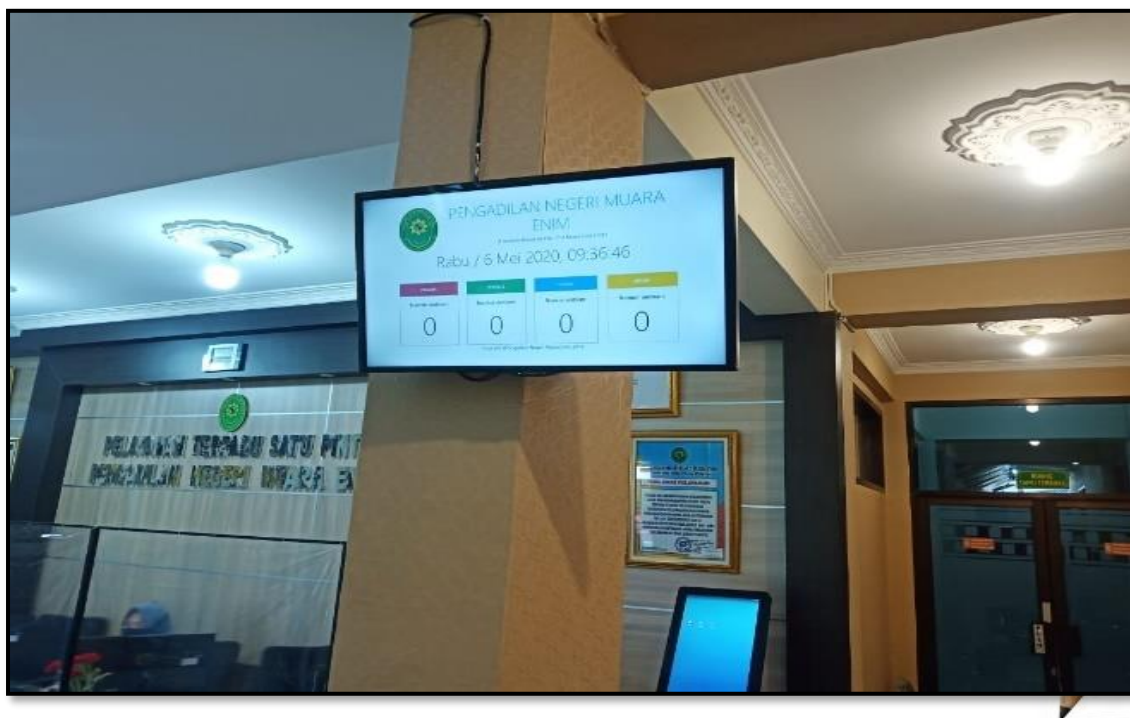
Ruang sidang Cakra



Akses masuk ruangan dengan finger scan / card scan



Ruang Media Center



Antrian pengunjung PTS



Ruang Laktasi



Toilet untuk Disabilitas



Ruang perpustakaan





CCTV



Mesin genset

Berikut laporan Barang Milik Negara berupa rumah dinas Pengadilan Negeri Muara Enim :

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Pengadilan Negeri Muara Enim					
	1. Rumah Dinas ketua	1	✓	-	-	Sertifikat No. 11
	2. Rumah Dinas Wakil Ketua	1	✓	-	-	Sertifikat No. 12
	3. Rumah Dinas hakim	5	✓	-	-	Sertifikat No. 28
	4. Rumah Dinas Panitera	1	✓	-	-	Sertifikat No. 29
	5. Rumah Dinas Sekretaris	1	✓	-	-	Sertifikat No. 28

Laporan Barang Milik Negara berupa sarana prasarana Pengadilan Negeri Muara Enim :

Uraian	Jumlah	Keterangan
1. Ruang Ketua	1	Baik
2. Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3. Ruang Hakim	1	Baik
4. Ruang Panitera	1	Baik
5. Ruang Sekretaris	1	Baik
6. Ruang Sidang Umum	2	Baik
7. Ruang Sidang Ramah Anak	1	Baik
8. Ruang Tunggu Bapas, BK	1	Baik
9. Ruang Tunggu Ramah Anak	1	Baik
10. Ruang Videoconference anak	1	Baik
11. Ruang Mediasi/Kaukus	1	Baik
12. Ruang Kepaniteraan	3	Baik
13. Ruang Kesekretariatan	3	Baik
14. Ruang Perpustakaan	1	Baik
15. Ruang DYK	1	Baik
16. Ruang Mushollah	1	Baik
17. Ruang Tahanan Dewasa	1	Baik
18. Ruang Tahanan Wanita	1	Baik
19. Ruang Tunggu Jaksa	1	Baik
20. Ruang Posbakum	1	Baik

21. Ruang Laktasi	1	Baik
22. Ruang Arsip	3	Baik
23. Ruang PTSP dan Informasi	1	Baik
24. Ruang Tunggu Pengunjung	1	Baik
25. Area Merokok	1	Baik
26. Ruang Tunggu KPN, WKPN,	1	Baik
27. Toilet KPN, WKPN, Hakim, Panitera	4	Baik
28. Toilet Pengunjung Laki- laki/Perempuan	2	Baik
29. Toilet Disabilitas	1	Baik
30. Toilet Pengunjung PTSP	1	Baik
31. Ruang Tunggu Tamu Terbuka Sarana/ Prasarana Fasilitas Perkantoran	1	Baik
32. Ruang Server	1	Baik
33. Ruang Media Center	1	Baik

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

a. Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum

Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan kegiatannya berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Juga tuntutan para pencari keadilan dan perkembangan zaman mengharuskan pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi. Sehingga dimungkinkan peradilan Indonesia memiliki sistem untuk melakukan pemanggilan para pihak melalui media elektronik yang saat ini di buat sebuah inovasi yaitu aplikasi e-court. Payung hukum pelaksanaan administrasi secara elektronik ini adalah peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Layanan e-court ini dapat digunakan oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar.



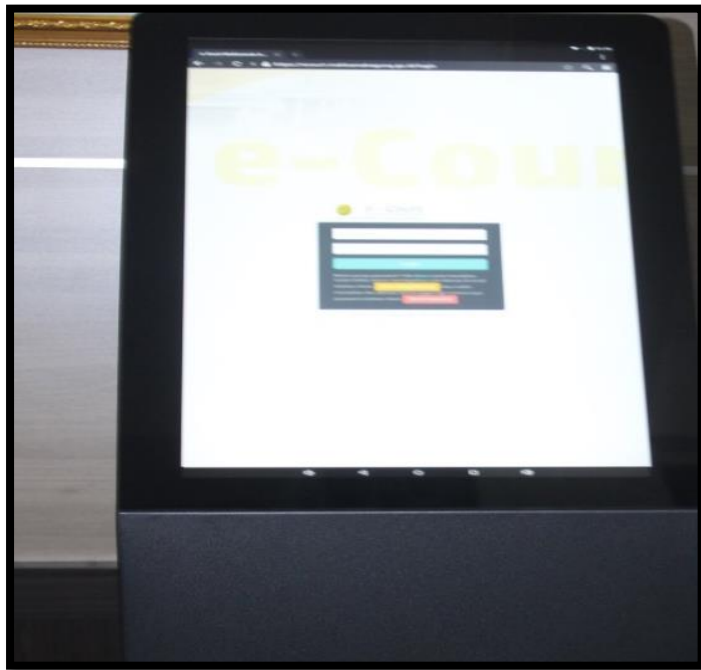


Aplikasi e-court

Adapun untuk melaksanakan perintah Ketua Mahkamah Agung RI dalam implementasi e-court tersebut adalah :

1. Pemasangan sapras pendukung e-court yaitu :
 - Kios Touchscreen untuk aplikasi e-court





Kios-K Touchscreen



Pojok e-court, eraterang dan Meja Inzage

2. Penanganan Perkara Melalui Layanan Pengadilan Elektronik pada tahun 2024 :

Perkara	Jumlah pengajuan secara e-court
Gugatan	30
Gugatan Sederhana	133
Permohonan	35
Permohonan Konsinyasi	0

b. Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum

Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Lembaga Peradilan yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI, salah satunya adalah dengan meningkatkan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi di Pengadilan sesuai dengan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan adapun pengelolaan rutinnya merupakan pelaksanaan dari SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144 tahun 2007 tersebut. Sebagai bagian dari core bisnis Peradilan Umum yaitu penyelesaian perkara, maka Mahkamah Agung RI meluncurkan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang tujuannya memberikan semua informasi terkait proses penanganan perkara. Selain itu, aplikasi SIPP ini difungsikan pimpinan Pengadilan untuk memonitor kinerja Hakim dan aparatur Pengadilan, tertib administrasi sebagai media kerja yang efektif bagi pengawasan internal.



Adapun untuk melaksanakan perintah Ketua Mahkamah Agung RI dalam implementasi SIPP tersebut adalah :

- Peningkatan bandwidth internet dengan menggunakan internet dedicated yaitu bandwidth 105 Mbps.
- Update aplikasi SIPP. Sampai saat ini aplikasi SIPP yang sudah di update versi 5.6.4
- Untuk mewujudkan transparansi penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Muara Enim telah melakukan publikasi terhadap perkara, baik pidana maupun perdata. Untuk publikasi perkara secara keseluruhan dapat dilihat pada aplikasi SIPP versi 5.6.4 yang beralamat di <http://sipp.pn-muaraenim.go.id>

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Muara Enim dalam Evaluasi Implementasi SIPP untuk Pengadilan Kelas IB Seluruh Indonesia, dengan kategori jumlah perkara 501-1000 perkara, nilai yang didapatkan untuk periode Januari sampai Desember 2024 adalah sebesar 956.19. Dengan pencapaian ini diharapkan pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Muara Enim dapat mempertahankan dan meningkatkannya lagi.

Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri								
32	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Sumbawa Besar	94.27%	96.59%	92.85%	97.77%	★★★★★ 95.37% (960.18)
33	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Wonosobo	96.99%	97.30%	90.41%	96.64%	★★★★★ 95.34% (950.49)
34	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Muara Enim	95.93%	96.87%	90.54%	97.89%	★★★★★ 95.31% (956.19)
35	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Lamongan	94.91%	95.38%	91.36%	99.54%	★★★★★ 95.30% (956.27)
36	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Tenggarong	95.56%	96.46%	91.66%	97.11%	★★★★★ 95.20% (957.10)
37	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang DI Mungkid	96.20%	97.89%	92.33%	94.03%	★★★★★ 95.11% (958.63)

c. Implementasi e-Berpadu di lingkungan Peradilan Umum

Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan kegiatannya Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT, Pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah meluncurkan Aplikasi E-Court yang kemudian pada tahun 2019 disempurnakan dengan e-Litigation dan upaya hukum banding secara elektronik. Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

- Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
- Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan
- Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
- Pengajuan Perpanjangan Penahanan
- Penangguhan Penahanan
- Permohonan Pembantaran Penahanan
- Permohonan Penetapan Diversi
- Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
- Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan



- Pendaftaran Praperadilan Elektronik
- Permohonan Izin Keluar Tahanan
- Permohonan Pengalihan Penahanan
- Permohonan Penangguhan Penahanan.



Aplikasi e-Berpadu

Penanganan Perkara Melalui Layanan Pengadilan Elektronik pada tahun 2024 :

Perkara	Jumlah pengajuan secara e-Berpadu
Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik	508
Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Pengegledahan	280

Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan	1077
Pengajuan Perpanjangan Penahanan	482
Penangguhan Penahanan	0
Permohonan Pembantaran Penahanan	0
Permohonan Penetapan Diversi	0
Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti	0
Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan	475
Pendaftaran Praperadilan Elektronik	0
Permohonan Izin Keluar Tahanan	0
Permohonan Izin Keluar Tahanan	0
Permohonan Pengalihan Penahanan	0
Permohonan Penangguhan Penahanan.	0



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Pembangunan Zona Integritas

Berdasarkan Permenpan No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan public yang prima.

Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM mencakup:

a. Pencanangan ZI

Pada tanggal 14 Januari 2019 Pengadilan Negeri Muara Enim melakukan pencanangan zona integritas dengan dilaksanakannya acara penandatanganan piagam Zona Integritas Pengadilan Negeri Muara Enim menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Pencanangan zona integritas di Pengadilan Negeri Muara Enim termasuk juga dengan melaksanakan penandatanganan dokumen Pakta Integritas oleh seluruh hakim, Aparatur Sipil Negara, dan PPNPN Pengadilan Negeri Muara Enim.

b. Penetapan unit kerja;

Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya:

1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

c. Pembangunan unit kerja;

Pengadilan Negeri Muara Enim melakukan penetapan program pembangunan Zona Integritas yang diselaraskan dengan enam area perubahan yang ada pada Zona Integritas. Untuk memastikan bahwa setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik, maka Pengadilan Negeri Muara Enim membentuk tim kerja yang terdiri dari pejabat dan pegawai untuk melakukan pembangunan pada tiap area perubahan.

Pengadilan Negeri Muara Enim mendapatkan apresiasi dan penganugerahan instansi dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tanggal 10 Desember 2019. Penghargaan ini merupakan apresiasi dari pemerintah terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Muara Enim. Bertempat di hotel Bidakara Jakarta, sebanyak 75 Pengadilan dari empat lingkungan peradilan di bawah instansi Mahkamah Agung RI berhak memperoleh predikat WBK dan dari 2 (dua) Pengadilan Negeri kelas II se-Indonesia salah satunya adalah Pengadilan Negeri Muara Enim.

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Muara Enim melanjutkan Zona Integritas untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dengan melaksanakan penilaian mandiri zona integritas melalui aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id dengan nilai pembangunan Zona Integritas sebesar 99.15 yang terdiri dari :



Pengungkit (60%)				Hasil (40%)	
Pemenuhan (30%)		Reform (30%)			
Area I	95,75	Area I	100	Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	100
Area II	100	Area II	100	Pelayanan Publik yang Prima	98,51
Area III	100	Area III	100		
Area IV	96,80	Area IV	96,40		
Area V	100	Area V	100		
Area VI	98,40	Area VI	100		
Total Pengungkit			98,63	Total Hasil	99,35

Hasil konkrit dari Pembangunan Zona Integritas adalah perubahan pada enam area yaitu :

Area I Manajemen Perubahan :

- Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas,
- Sosialisasi Pembangunan ZI kepada stakeholder internal dan eksternal,
- Perubahan budaya kerja dan pola pikir (Pimpinan adalah role model, Penetapan agen perubahan, Disiplin waktu dan pekerjaan)

Area II Penataan Tata Laksana :

- Penerapan Standar Operasional Prosedur dalam setiap proses bisnis,
- Evaluasi berkelanjutan terhadap Standar Operasional Prosedur yang telah diterapkan,
- Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan adanya inovasi-inovasi,



- Keterbukaan informasi Publik

Area III Penataan Manajemen SDM :

- Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi,
- Adanya pola mutasi internal,
- Pengembangan pegawai berbasis kompetensi,
- penggunaan aplikasi SIKEP,
- penegakan aturan disiplin dengan pemberian *reward and punishment.*,

Area IV penguatan akuntabilitas kinerja :

- Peningkatan capaian kinerja pada setiap sasaran strategis,
- Perencanaan Kinerja melibatkan semua unsur,
- Penilaian mandiri menggunakan aplikasi SEMAR

Area V Penguatan pengawasan :

- peningkatan implementasi penguatan pengawasan melalui aplikasi SIWAS, LAPOR,
- Pengendalian Gratifikasi,
- Penerapan system Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Area VI dan peningkatan pelayanan public :

- Membuat standar pelayanan dan dimaklumkan,
- Membuat SOP Pelayanan,
- Melaksanakan sosialisasi/pelatihan pelayanan prima,
- Terdapat layanan terpadu/terintegrasi (PTSP),
- Melaksanakan survey kepuasan masyarakat yang dipublikasi dan di tindaklanjuti, Peningkatan sarana dan prasarana.



d. Pemantauan Pembangunan ZI.

Tim Penilai Internal dari Pengadilan Tinggi Palembang melaksanakan pendampingan dan penilaian terhadap pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Muara Enim.

B. Program AMPUH (SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH)

Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014. AMPUH merupakan salah satu bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Ruang lingkup program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Kegiatan asesmen sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) meliputi 3 (tiga) kegiatan asesmen secara menyeluruh sebagai berikut :

1. Asesmen Elektronik Pelayanan PTSP satuan kerja melalui monitoring CCTV pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Pengamatan oleh Asesor :
 - 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), Inisiatif dan keramahan petugas PTSP
 - Disiplin (seragam sesuai dengan ketentuan, menggunakan name tag, kehadiran sesuai absensi dan bekerja di tempat masing-masing sesuai tugas)



- Pelaksanaan survei (SKM, SPKP dan SPAK) yaitu kesesuaian jumlah pengunjung dengan jumlah responden, penggunaan Si Super dan tindak lanjut tiga unsur terendah)
 - Pelaksanaan monitoring Hakim Pengawas PTSP
 - Penataan ruang PTSP (kenyamanan dan kesesuaian kelengkapan).
2. Asesmen Administrasi Perkara Pengadilan secara elektronik (Evaluasi Implementasi SIPP) oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
 3. Asesmen sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) dalam bentuk kegiatan asesmen ke Pengadilan (dengan menggunakan lembar asesmen yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum).

1. Asesmen Elektronik Pelayanan PTSP satuan kerja melalui monitoring CCTV pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Asesmen ini dilakukan oleh tim aparatur yang ditunjuk dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Tim tersebut wajib melakukan monitoring minimal 10 (sepuluh) kali dalam sebulan dan melaporkan hasil monitoring secara berkala dengan lembar monitoring yang sudah disediakan tersebut setiap bulan kepada Kepala Sub Direktorat Bimbingan dan Monitoring pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

2. Asesmen Administrasi Perkara Pengadilan secara elektronik (Evaluasi Implementasi SIPP).

Dilakukan oleh tim Sub Direktorat Statistik dan Dokumentasi pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang dilakukan setiap bulan dan wajib mengkoordinasikannya kepada Kepala Sub Direktorat



Bimbingan dan Monitoring pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

3. Asesmen Kinerja dan Layanan dalam kerangka sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH)

Dalam bentuk kegiatan asesmen oleh Tim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atau Tim Pengadilan Tinggi yang sudah terakreditasi/ yang sudah diberikan sertifikat mutu pengadilan unggul ke satuan kerja yang dinilai dengan menggunakan lembar asesmen.

Pada tahun 2024, pelaksanaan assessment AMPUH pada Pengadilan Negeri Muara Enim, telah dilaksanakan pada tanggal 13-14 Juni 2024. Predikat Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan tangguh (AMPUH) pada tahun 2024 dengan Nilai : 798,57, Predikat : UTAMA

C. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Tujuan dari PTSP ini adalah mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

Pengadilan Negeri Muara Enim telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang terdiri dari 4 (empat) layanan : layanan umum dan keuangan, pidana, perdata, dan hukum. Selain itu pada PTSP juga terdapat layanan meja informasi dan pengaduan, serta layanan pojok e-court. PTSP pada meja umum dan keuangan bertugas menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri. PTSP pada meja kepaniteraan perdata bertugas menerima pendaftaran perkara baik permohonan, gugatan maupun gugatan sederhana

tingkat pertama, banding atau kasasi dan layanan-layanan lain yang berhubungan dengan kepaniteraan perdata. PTSP pada meja kepaniteraan pidana bertugas menerima pelimpahan perkara pidana, pendaftaran perkara pidana, permohonan izin/persetujuan penggeledahan/penyitaan/pemusnahan barang bukti/perpanjangan penahanan/pembantaran dan menyerahkan permohonan yang telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, dan layanan-layanan lain yang berhubungan dengan kepaniteraan pidana. PTSP pada meja kepaniteraan hukum bertugas menerima permohonan pendaftaran pendirian CV/waarmaking surat-surat, pendaftaran surat kuasa/legalisasi surat, permohonan keterangan data perkara, permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara, layananan pengaduan SIWAS MARI dan layanan-layanan lain yang berhubungan dengan kepaniteraan hukum.

PTSP Pengadilan Negeri Muara Enim dilengkapi dengan sarana prasarana sebagai berikut :

1. Meja Informasi dan Pengaduan
2. Meja layanan PTSP (Umum, Pidana, Perdata, Hukum)
3. Meja Inzage
4. Kursi pengguna layanan PTSP
5. Mesin antrian pengunjung
6. Kios-K touchscreen untuk aplikasi e-court dan eraterang
7. Air mineral untuk pengunjung
8. Brosur-brosur produk layanan PTSP
9. Kotak saran dan pengaduan
10. Banner dan pamflet informasi Pengadilan
11. Meja untuk menulis bagi pengguna layanan PTSP
12. Mesin EDC
13. Kamera pengawas (CCTV)
14. PC untuk Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Persepsi Korupsi secara elektronik



15. PC dan printer scanner pada masing-masing meja pelayanan.
16. Jalur khusus bagi penyandang disabilitas
17. Kursi roda bagi penyandang disabilitas





Meja PTSP



Meja Informasi dan Pengaduan dengan antrian pengunjung



Kursi pengunjung



Meja Inzage dan Pojok e-court



Kursi roda untuk difabel



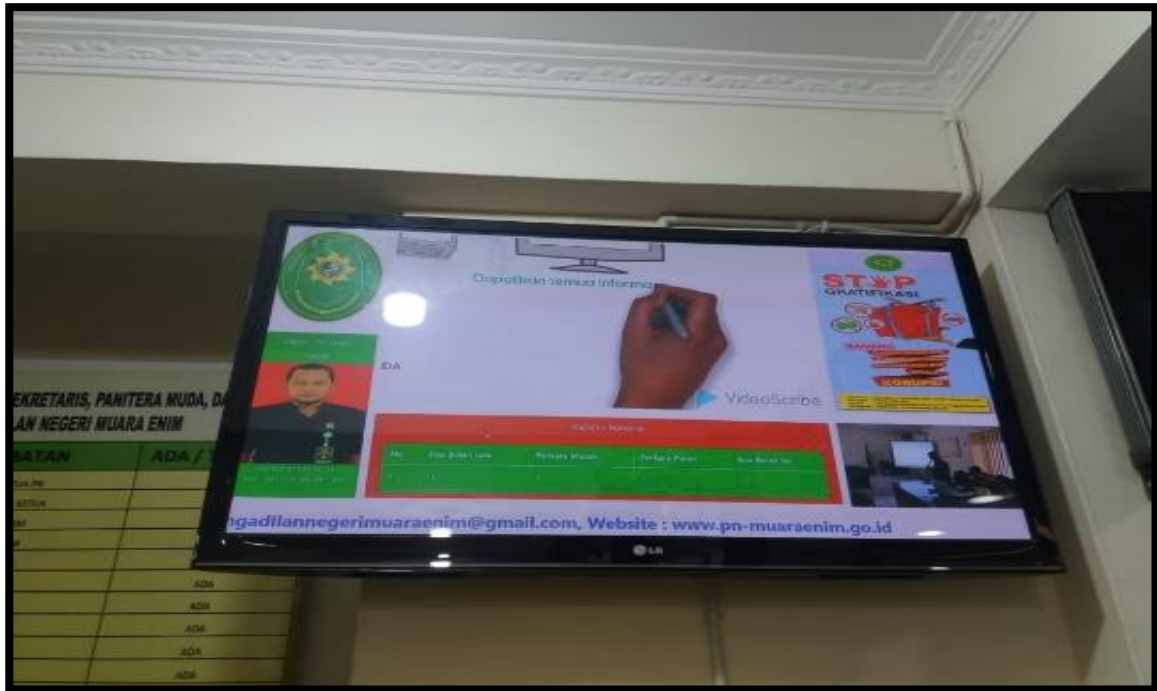
Meja tulis pengguna PTSP



Kotak Saran



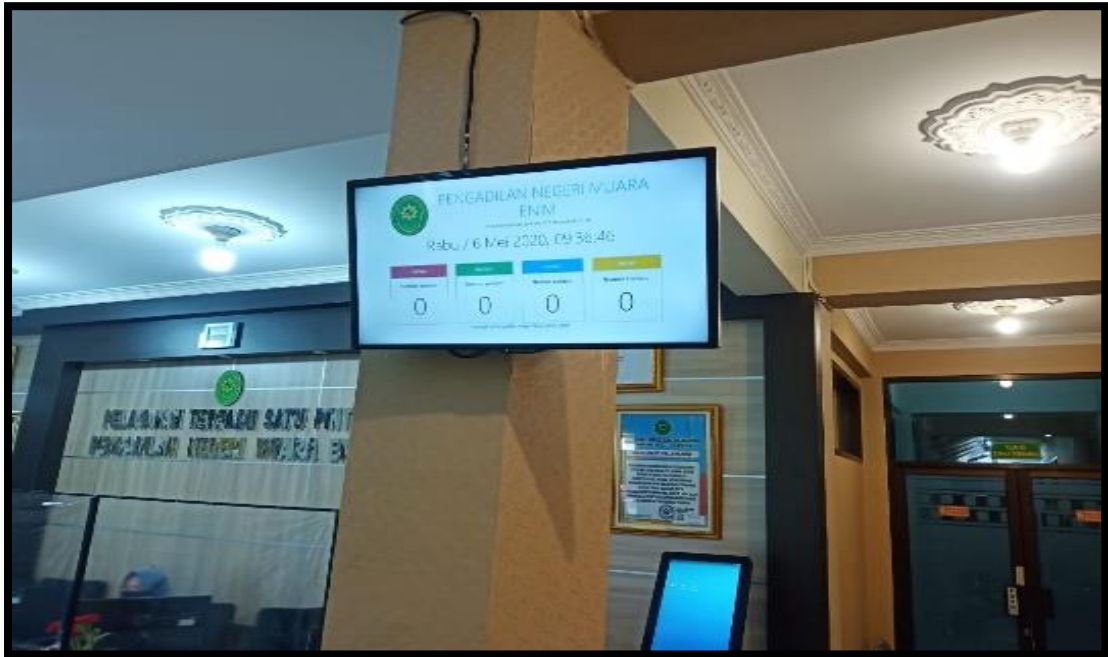
Survey IKM dan IPK secara elektronik



TV Profil Pengadilan



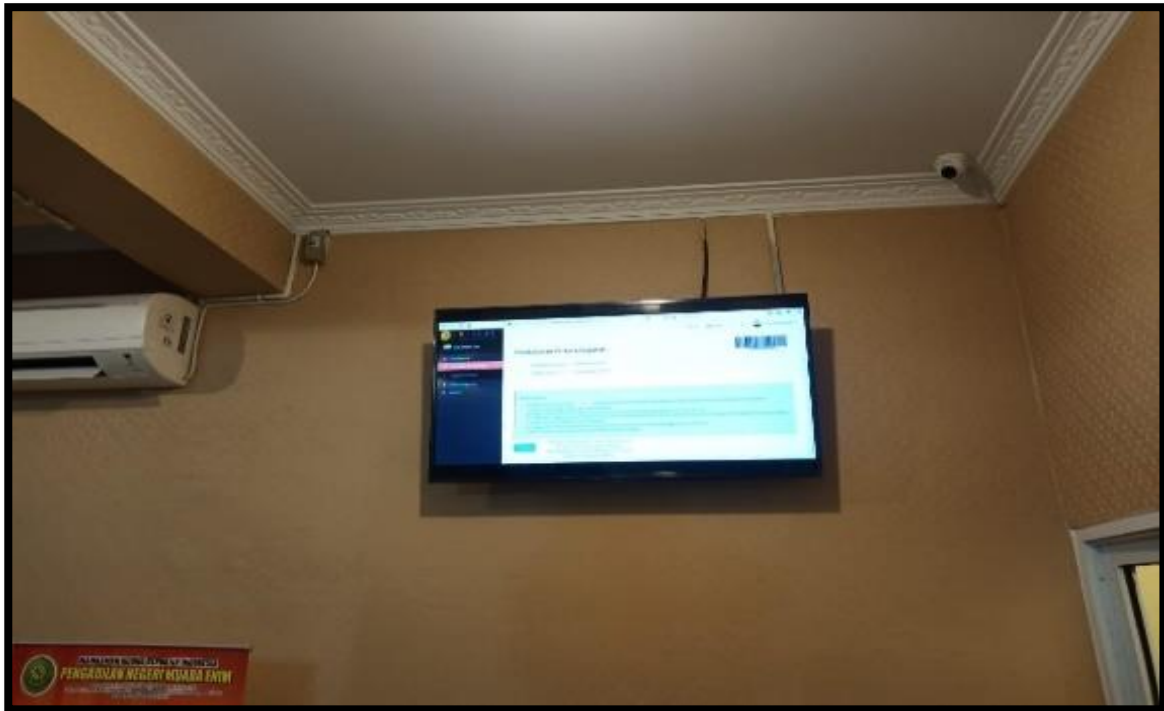
Brosur dan mesin EDC



Antrian Pengunjung



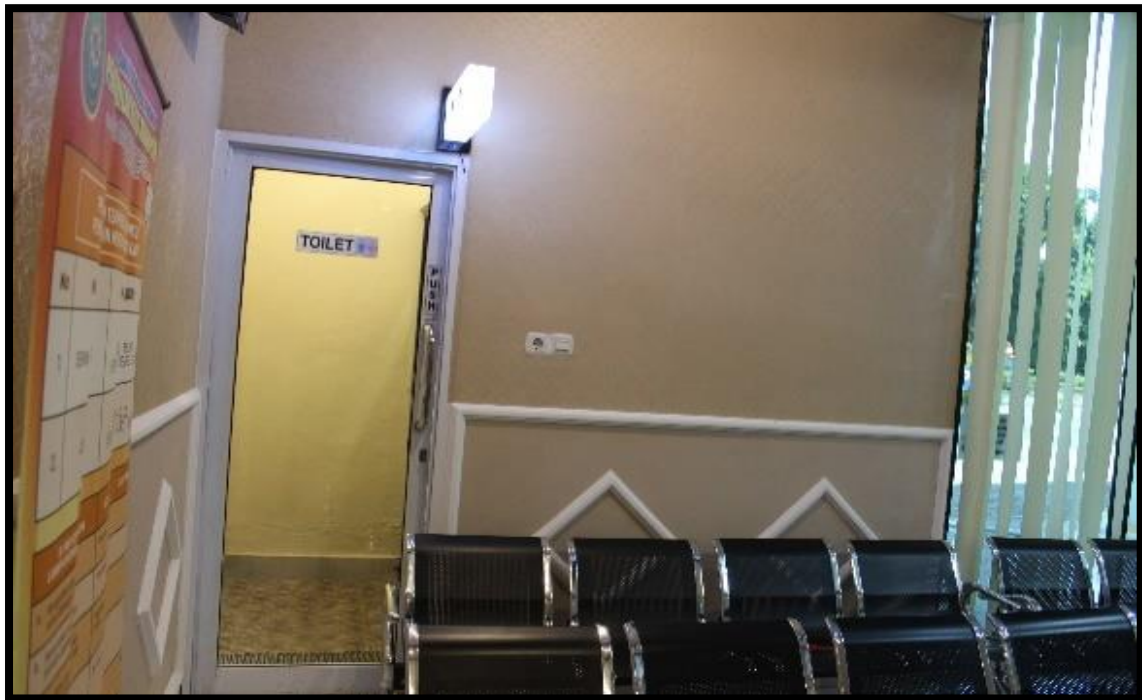
Kios-K Touchscreen e-court dan Eraterang



TV informasi produk PTSP



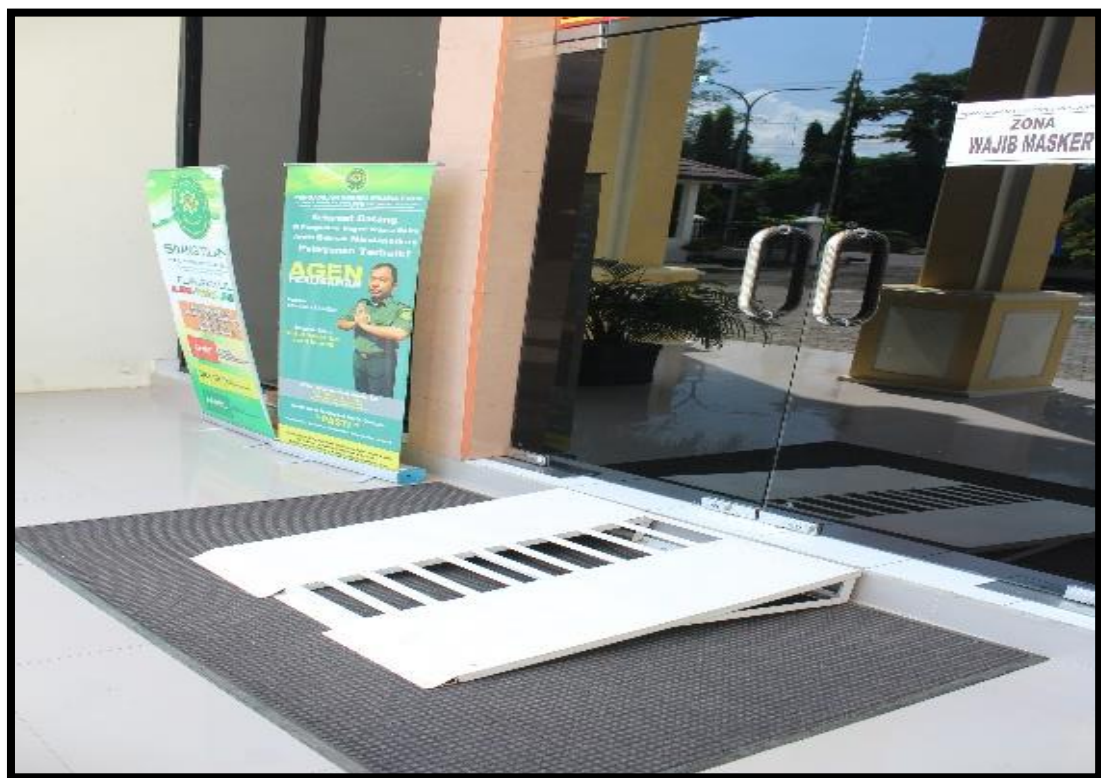
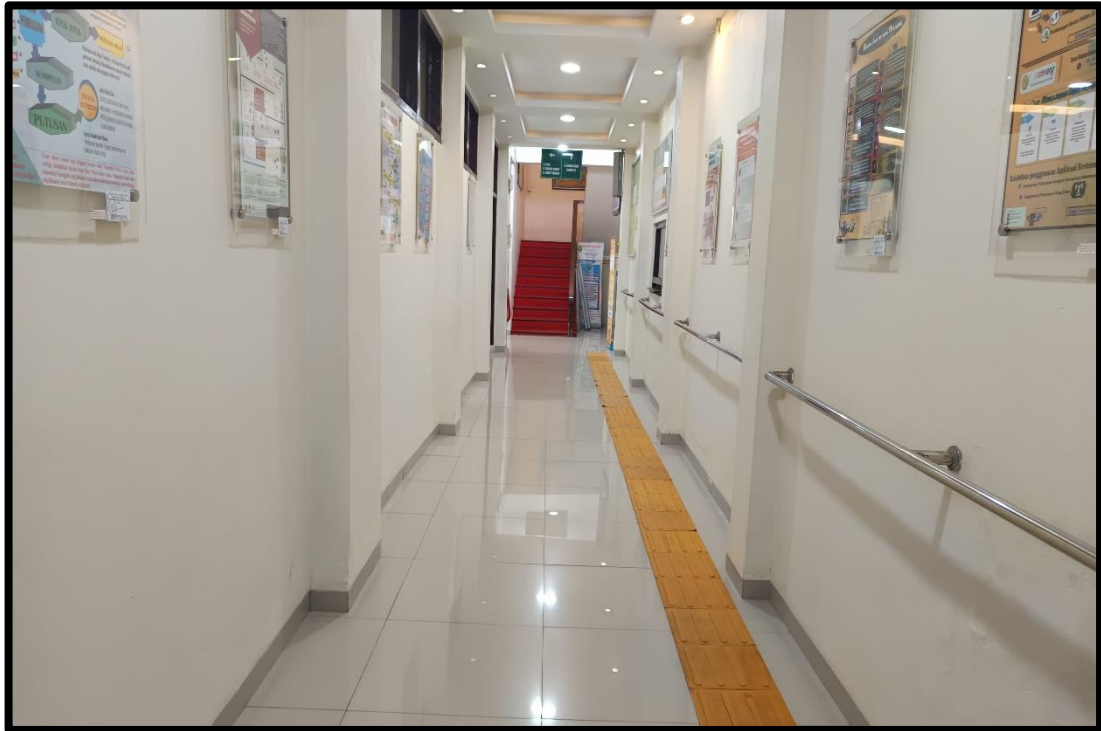
TV informasi jangka waktu pelayanan



Toilet PTSP



Ruang Tamu Terbuka



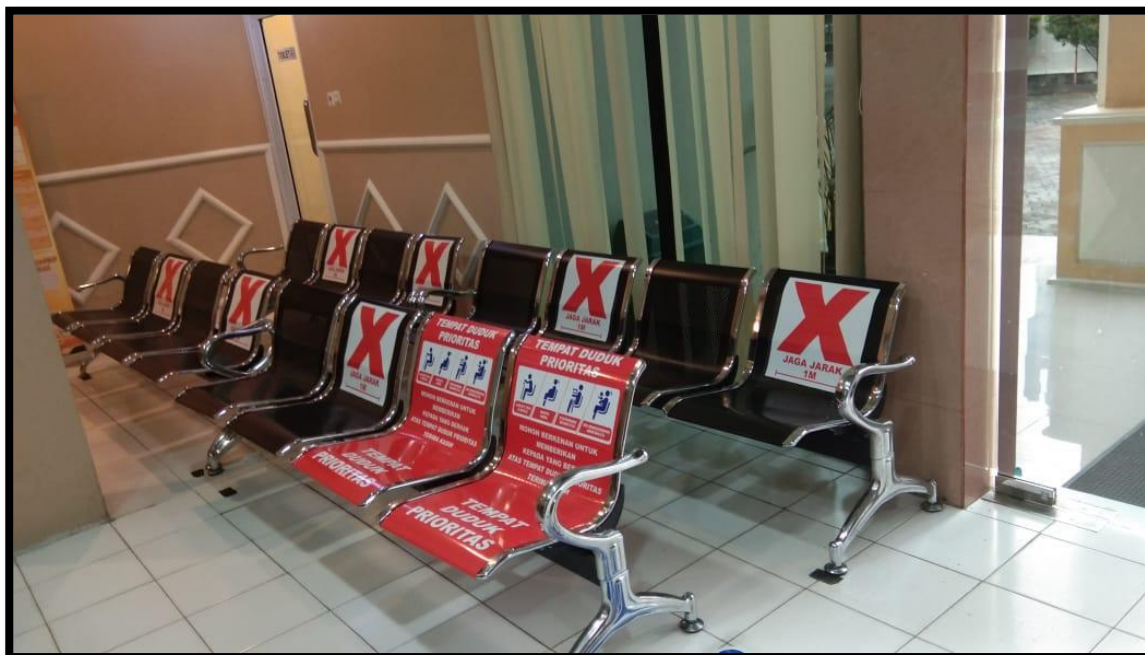
Jalur khusus difabel



Antrian Prioritas



Tongkat Kaki Tiga



Tempat Duduk Prioritas





CCTV pada PTSP



Berikut jumlah surat pada tahun 2024 :

No	Jenis Surat	Jumlah
1	Surat Masuk	868
2.	Surat Keluar	2206
3.	Permohonan Surat Keterangan (SUKET) pada aplikasi eraterang	551

Untuk melihat sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di PTSP, Pengadilan Negeri Muara Enim melaksanakan survey kepuasan kepada masyarakat dan survey persepsi korupsi menggunakan aplikasi SISUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik) Badan Peradilan Umum. Berikut data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2024.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

SKALA	TRIWULAN 1 (JAN-MAR)	JML RESPONDEN TRW 1	TRIWULAN 2 (APR-JUN)	JML RESPONDEN TRW 2	TRIWULAN 3 (JUL-SEPT)	JML RESPONDEN TRW 3	TRIWULAN 4 (OKT-DES)	JML RESPONDEN TRW 4
1-100	98,48	104	99,59	164	99,94	218	99,64	139
1-4	3,94		3,98		4,00		3,99	

Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

SKALA	TRIWULAN 1 (JAN-MAR)	JML RESPONDEN TRW 1	TRIWULAN 2 (APR-JUN)	JML RESPONDEN TRW 2	TRIWULAN 3 (JUL-SEPT)	JML RESPONDEN TRW 3	TRIWULAN 4 (OKT-DES)	JML RESPONDEN TRW 4
1-100	98,81	109	99,99	175	99,29	214	99,98	138
1-4	3,95		4,00		3,97		4,00	

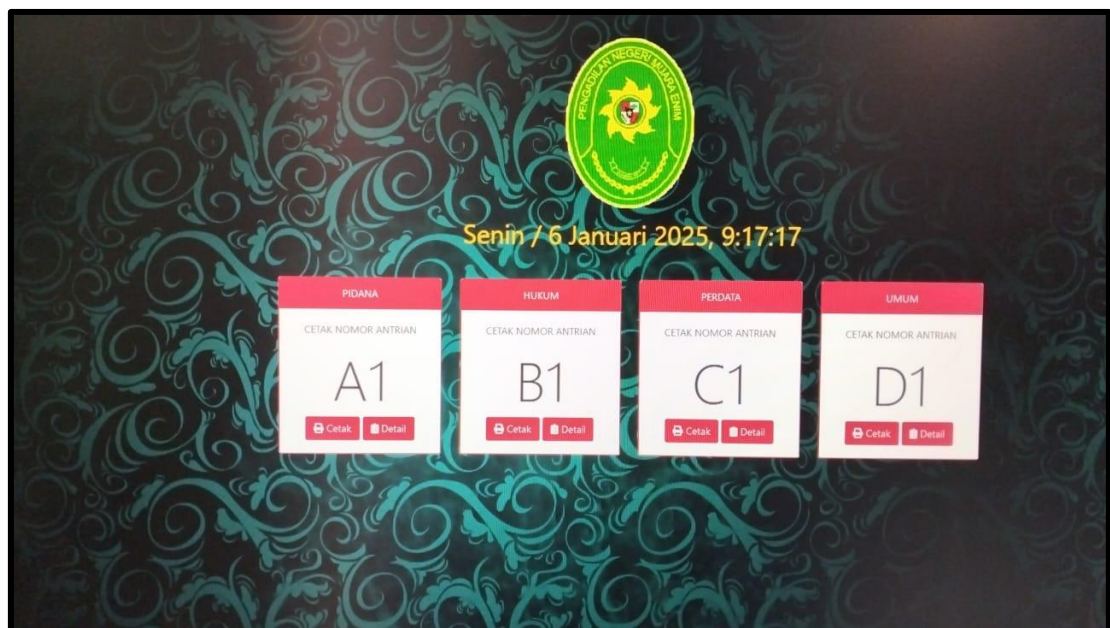


C. Inovasi Pelayanan Publik

Tuntutan para pencari keadilan dalam kemudahan berusaha dan perkembangan zaman, mengharuskan pelayanan di Pengadilan menjadi lebih sederhana, efektif dan efisien dan sangat dimungkinkan untuk berbasis elektronik. Dalam menjalankan tupoksinya Pengadilan Negeri Muara Enim berusaha memberikan kepuasan dan layanan terbaik, yaitu dengan membuat beberapa inovasi untuk memberikan kemudahan dan juga informasi kepada para pengguna peradilan.

1. Aplikasi Antrian Pengunjung (e-SANJUNG)

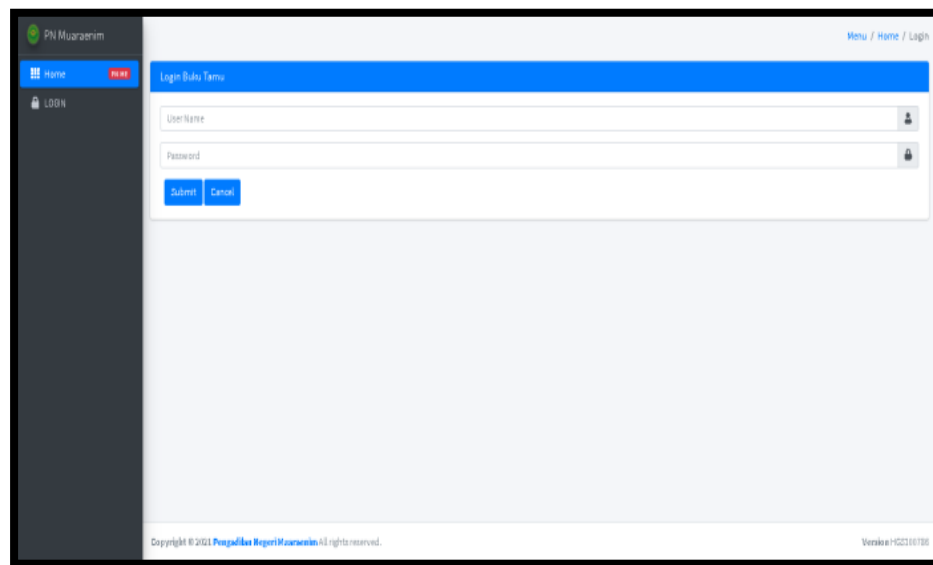
Tujuan dari aplikasi ini dibuat adalah untuk memudahkan antrian para pengguna peradilan di meja PTSP. Antrian ini berbasis elektronik dan layanan PTSP menjadi lebih tertib.



Aplikasi Sanjung (Sistem Antrian Pengunjung)

2. Buku Tamu Elektronik PN Muara Enim

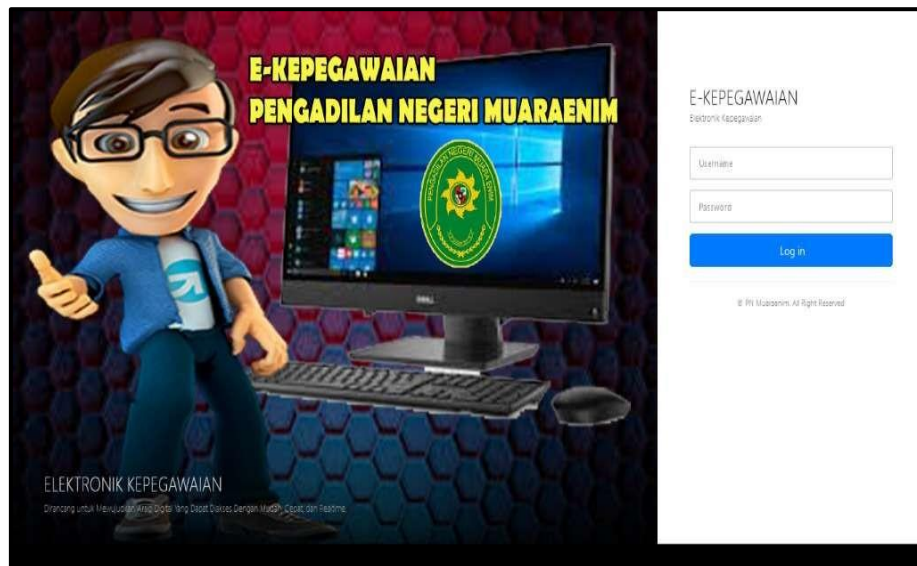
Buku Tamu Elektronik PN Muara Enim adalah aplikasi berbasis elektronik yang merekam data atau informasi terkait tamu /pengunjung yang memerlukan pelayanan pada meja PTSP dan tamu /pengunjung umum pada Pengadilan Negeri Muara Enim. Aplikasi ini dilengkapi dengan Fitur Perekam Wajah dan Notifikasi via telegram.



3. Aplikasi E-Kepegawaian

Aplikasi E-Kepegawaian merupakan aplikasi berbasis elektronik yang dirancang untuk mewujudkan sistem kearsipan data. Administrator dalam hal ini bidang Kepegawaian melakukan pengarsipan terkait data secara online dalam bentuk format yang diinginkan guna pencarian yang mudah dan cepat terkait arsip kepegawaian.





Arsip Surat Keputusan KPN

Cari: Tampilkan: 10 home

No	Tanggal SK	Nama SK	File SK
1	10-12-2022	SATUAN TUGAS ANTI NARKOBA DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	Download
2	09-12-2022	PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP) PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS III	Download
3	09-12-2022	PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP) PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS III	Download
4	03-12-2022	TIM SELEKSI CAON LEMBAGA PEMBIERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSHAKUM) PADA PNMBE	Download
5	10-11-2022	SUSUNAN MAJLIS HAKIM, PANITIA PENGACANTU DALAM MAJLIS HAKIM, JADWAL HARI DAN JAM SIDANG PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	Download
6	02-11-2022	PEMBENTUKAN TIM SURVEI HARIAN KEPUASAN MASYARAKAT PADA APLIKASI SURVEI PELAYANAN ELEKTRONIK (SISUPER) PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	Download
7	02-11-2022	PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	Download
8	02-11-2022	PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	Download
9	12-10-2022	PEMBENTUKAN TI EVALUASI TERHADAP TENAGA PPNN	Download
10	11-10-2022	PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN ANALIS JABATAN ANALIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS III	Download

Halaman: 1 dari 29

Previous 1 2 3 4 5 19 Next

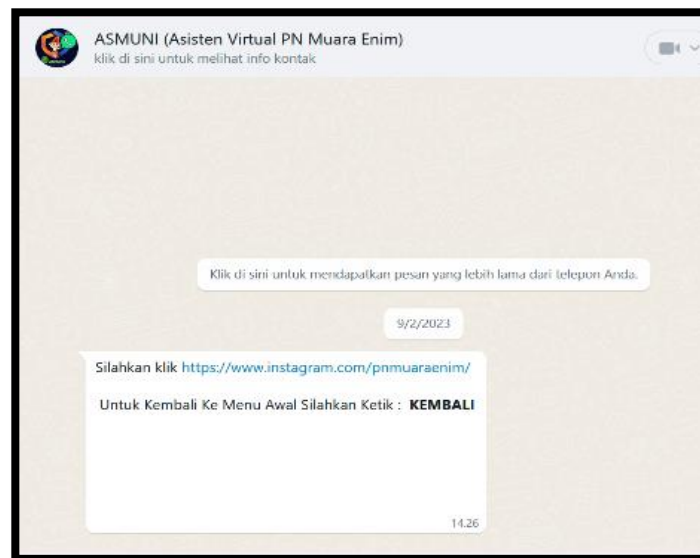
E-KEPEGAWAIAN PN MUARAENIM Tautan Terkait

© Pengadilan Negeri Muara Enim 2024. All Rights Reserved. 1.2.2024 10:00 AM



4. ASMUNI (Asisten Virtual PN Muara Enim)

ASMUNI merupakan Virtual Whatsapp informasi pelayanan pada Pengadilan Negeri Muara Enim. Pengunjung dapat mengakses ASMUNI via Aplikasi Whatsapp dengan Scan Barcode atau menambahkan Kontak ASMUNI. Pengunjung juga dapat mengakses aplikasi ASMUNI pada Website Pengadilan Negeri Muara Enim.



5. Aplikasi antrian persidangan elektronik dan whatsapp informasi jadwal persidangan (e sindang)

Aplikasi ini merupakan aplikasi Pelayanan Informasi terkait jadwal sidang.



Antrean Sidang Pengadilan Negeri Muara Enim

INFO SIDANG TANGGAL : 08-04-2021

SIDANG BERLANGSUNG	DAFTAR PERSIDANGAN HARI INI
RUANG SIDANG Prof. Dr. Kusuma Atmadja, S.H. Tidak digunakan	
RUANG SIDANG CAKRA Tidak digunakan	
RUANG SIDANG RAMAH ANAK SARI Tidak digunakan	
RUANG MEDIASI Tidak digunakan	



Manajemen Antrian Sidang
Pengadilan Negeri Muara Enim

Login

Username

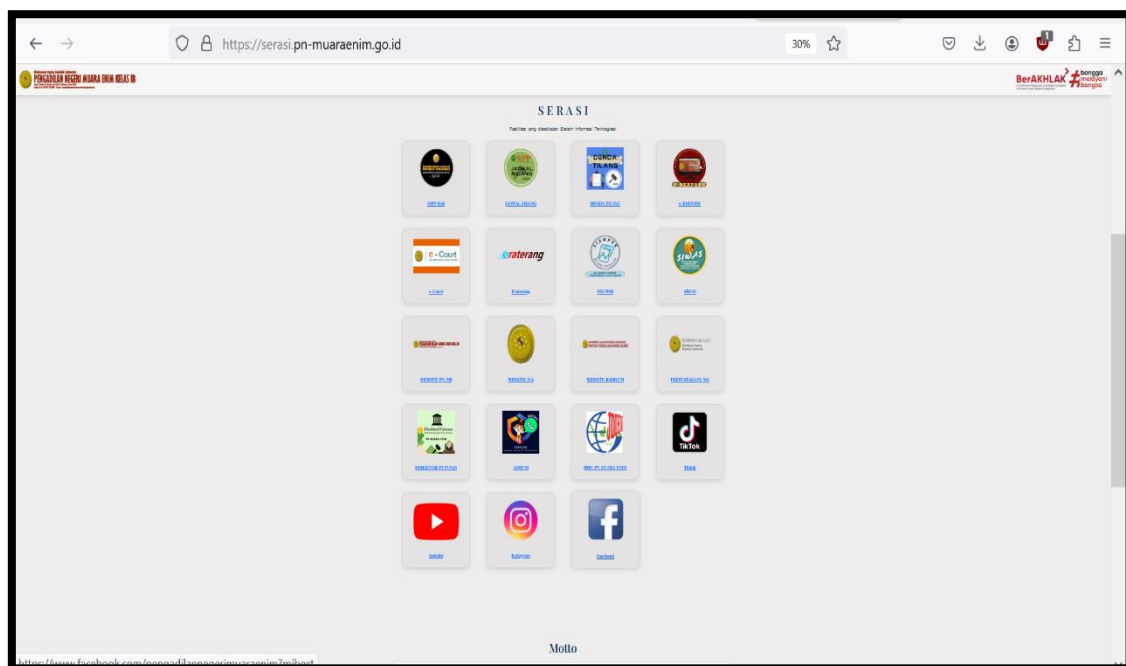
Password

Login

6. Aplikasi SERASI (SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI) Layanan informasi secara cepat dan terintegrasi dalam satu halaman web

Aplikasi “SERASI” : “Sistem Informasi Terintegrasi” merupakan aplikasi yang dirancang dengan tujuan mempermudah masyarakat dan pencari keadilan untuk mengakses layanan Pengadilan Negeri Muara Enim serta mendapatkan informasi secara cepat dan terintegrasi dengan fitur-fitur yang terdapat dalam satu halaman web. Aplikasi bisa dibuka dengan mengetik alamat pada browser : <https://serasi.pn-muaraenim.go.id/>





BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan Internal adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Pimpinan Pengadilan Negeri yang bertujuan untuk menjaga agar para pejabat peradilan baik kepada pejabat kepaniteraan maupun kesekretariatan dan para Hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak mengabaikan keluruhan martabat atau tugas jabatannya dan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau melanggar sumpah jabatan dan tidak melanggar kode etik profesinya.

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud agar dapat memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi pengadilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan, mencegah terjadinya penyimpangan, maal administrasi dan ketidak efisienan penyelenggaraan peradilan serta menilai kinerja.

Adapun fungsi pengawasan meliputi :

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya
- c. Menjamin terwujudnya pelayanan public yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi ; kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah

Pengawasan internal di dalam lingkungan pengadilan terdiri dari dua (2) pengawasan yaitu pengawasan melekat, dan pengawasan rutin.



- **Pengawasan melekat**

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan pengawasan melekat ini dilakukan dengan melakukan rapat dan membuat laporan bulanan setiap bagian di kepaniteraan yaitu Kepaniteraan pidana, hukum dan perdata dan kesekretariatan yaitu subbagian umum dan keuangan, kepegawaian dan ortala, dan perencanaan dan teknologi informasi dan pelaporan. Panitera juga melakukan pengawasan melekat dengan melakukan rapat bersama seluruh personil kepaniteraan terkait percepatan penyelesaian perkara, adminitrasi kepaniteraan dan permasalahan di bagian kepaniteraan. Sekretaris juga melakukan pengawasan melekat dengan melakukan rapat bersama seluruh personil kesekretariatan terkait pelaksanaan anggaran keuangan, pengelolaan barang milik Negara, absensi, pelaporan dan permasalahan di bagian kesekretariatan.

Pengawasan melekat juga mengatur masalah kedisiplinan baik bagi para hakim maupun pegawai dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya. Dan dipertegas lagi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2019 tentang penegakan disiplin kerja hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Peraturan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2019 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di di bawahnya. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 tahun 2019 tentang pedoman penanganan pengaduan (*whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.



- **Pengawasan rutin**

- a. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencakup :
 - administrasi persidangan
 - administrasi perkara
- b. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang mencakup:
 - administrasi kepegawaian, keuangan, umum, perencanaan dan teknologi informasi
- c. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan, dan kualitas pelayanan publik.

Negeri
entang
rtugas
dapun
Ketua

No	Nama	Jabatan	Pengawasan Bidang
1.	Arief Karyadi, S.H., M.Hum	Wakil Ketua Pengadilan Negeri	Koordinator Pengawasan
2.	Sera Ricky Swanri S, S.H	Hakim	Perdata
3.	Miryanto, S.H., M.H	Hakim	Pidana
4.	Titis Ayu Wulandari, S.H	Hakim	Hukum
5.	Miryanto, S.H., M.H	Hakim	Umum dan Keuangan
6.	Shelly Noveriyati S, SH	Hakim	Kepegawaian dan Ortala
7.	Dewi Yanti, SH	Hakim	PTIP

Disamping itu pengawasan rutin yang dilakukan bersifat membimbing dan membina diwujudkan dengan diadakannya pertemuan berkala (rapat bulanan) oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan segenap jajarannya setiap bulan, sehingga semua kendala-kendala yang ada dapat segera diatasi dan diminimalisir.

B. Evaluasi

Hasil pengawasan internal, baik pengawasan melekat maupun pengawasan rutin harus dituangkan dalam bentuk laporan tertulis disertai dengan bukti dokumentasi dan absensi jika pengawasan dalam bentuk rapat.

Hal hal yang perlu menjadi bahan evaluasi adalah temuan-temuan di lapangan berupa permasalahan setiap bidang, penyebab terjadinya permasalahan tersebut dan rekomendasi perbaikan untuk penyempurnaan atas kekurangan yang ditemui.

Salah satu kegiatan evaluasi pengawasan internal kantor Pengadilan Negeri Muara Enim adalah dengan mengadakan audit internal yang dilakukan oleh tim audit internal pada setiap bidang. Kemudian dilakukan rapat tinjauan manajemen untuk mengevaluasi hasil dari audit internal.



Dengan adanya evaluasi atas hasil pengawasan internal, diharapkan tidak ada lagi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan aparat pengadilan. Dilakukannya pembetulan, penyempurnaan, perbaikan dalam pengelolaan administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan. Sehingga didapat kepuasan atas kinerja pelaksanaan tugas pelayanan publik di bidang hukum dan keadilan demi terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2024 ini memuat uraian lengkap mengenai berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang di emban oleh Pengadilan Negeri Muara Enim baik program kerja, kebijakan strategis, pembinaan sumber daya manusia dan pengelolaan penyelesaian perkara, sarana prasarana, pengelolaan keuangan.

Pengadilan Negeri Muara Enim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam wilayah hukumnya, telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada.

Secara umum, kualitas administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Negeri Muara Enim telah berjalan baik. Penyempurnaan terhadap kualitas pengelolaan administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan akan tetap dilakukan untuk mewujudkan visi Pengadilan Negeri Muara Enim yaitu *“Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim Yang Agung”*



B. Rekomendasi

1. Sumber Daya Manusia teknis dan non teknis pada Pengadilan Negeri Muara Enim kiranya dapat ditambah mengingat jumlah perkara yang setiap tahun meningkat dan terdapatnya beberapa pegawai yang merangkap tugas disamping tugas utamanya.
2. Perlunya penambahan anggaran belanja modal untuk sarana dan prasarana serta pembangunan gedung baru Pengadilan Negeri Muara Enim sesuai dengan prototype.
3. Mahkamah Agung dapat mengadakan bimbingan teknis untuk Bagian Kesekretariatan, seperti bidang Umum dan Keuangan, bidang Kepegawaian, Kearsipan maupun Perpustakaan, serta bimbingan untuk pemanfaatan dan pengelolaan Teknologi Informasi. Bimbingan teknis di bagian Kepaniteraan, seperti pengolaan arsip perkara, bimtek e-court, bimtek SIPP, bimtek pembuatan Berita Acara Perkara, pedoman Layanan hukum dan penanganan pengaduan, serta bimtek Lainnya yang berhubungan dengan percepatan penyelesaian perkara.

